



**KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**



PERIODE 03 JULI 2023



Title	Budi Daya Sorgum di Sulawesi Dipacu	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juli 2023	
Media	Koran Jakarta	
Page	6	
Author	Ers/E-10	

Diversifikasi Pangan | Kabupaten Pangkep Jadi Salah Satu Kawasan Penghasil Sorgum

Budi Daya Sorgum di Sulawesi Dipacu

Pemerintah pusat menggandeng daerah men-genjot produksi sorgum sebagai alternatif sumber pangan dan komoditas ekspor.

JAKARTA – Pemerintah pusat mendorong pengembangan budi daya Sorgum yang merupakan salah satu pangan alternatif bernilai ekonomi tinggi dan tahan kekeringan di berbagai daerah. Langkah ini sekaligus menjadi salah satu upaya antisipasi krisis pangan dengan meningkatkan produksi dan konsumsi pangan lokal, di tengah upaya penguatan pangan menghadapi tantangan perubahan iklim ekstrem.

“Hari ini, saya di Pangkep bersama Bapak Bupati Pangkep untuk melihat berbagai potensi lahan yang dimiliki Kabupaten Pangkep baik itu lahan di pulau, sekitaran pantai, dataran rendah, lahan yang berbukit bukit dan hari ini Bapak Bupati mencoba menanamkan sorgum,”

ucap Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, melalui keterangannya usai melakukan tanam Sorgum di Taman Teknologi Pertanian Ds. Barabatu, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Jumat (23/6).

Menurutnya, komoditas sorgum merupakan tanaman sereal potensial untuk dikembangkan untuk menunjang program ketahanan pangan dan agribisnis. Ini mengingat daya adaptasinya serta kebutuhan airnya rendah sehingga tahan cuaca panas atau musim kemarau panjang atau El Nino.

Mentan menegaskan Kementerian Pertanian (Kementan) dan Pemerintah Kabupaten Pangkep berkomitmen

melakukan perluasan per-tanaman sorgum hingga 500 hektare untuk tahap awal. Pengembangan sorgum tentu dilakukan juga di daerah yang potensi untuk ditanami sorgum.

“Di pusat kajian pertanian ini, kita akan coba konsentrasi kembangkan berbagai jenis jenis varietas pertanian untuk petani Pangkep. Kita berharap Pangkep bisa menjadi sebuah kekuatan baru hadirnya pertanian-pertanian yang bisa menyangga isu krisis pangan dan fenomena elnino,” tegasnya.

Selain tanam sorgum, Mentan juga sekaligus melakukan demonstrasi pembuatan Elisitor biosaka dan pupuk organik bersama Bupati dan petani Pangkep. Diharapkan upaya ini menjadi langkah nyata dalam mengantisipasi kenaikan harga pupuk kimia, sehingga penggunaan atau ketergantungan terhadap pupuk kimia berkurang.

“Elisitor Biosaka ini pem-

buatannya mudah, hanya perlu dibuat dari minimal lima jenis daun atau rumput di sekitaran. Biosaka ini sudah terbukti kegunaannya diberbagai daerah,” ungkapnya.

Bupati Pangkep, Yusran Lalogau, mengatakan pemerintah daerah Pangkep fokus melakukan pengembangan komoditas sorgum di beberapa kawasan pertanian. Diharapkan ke depan, Kabupaten Pangkep menjadi salah satu kawasan penghasil sorgum untuk dikonsumsi secara nasional bahkan suplai pasar ekspor.

Yusran menambahkan Kabupaten Pangkep juga berupaya meningkatkan produksi komoditas pangan utama yakni padi dengan penggunaan benih unggul, alat mesin pertanian hingga teknologi pertanian. Melalui upaya ini, produksi padi di Kabupaten Pangkep mengalami peningkatan.

“Di tahun lalu, rata-rata hasil panen di Kabupaten Pan-

gkep mengalami peningkatan, dari 6,5 ton per hektare di tahun sebelumnya dan saat ini sudah 6,8 ton per hektare,” sebutnya.

Produsen Beras

Sementara itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Suwandi, mengatakan Pangkep sebagai salah satu kabupaten produsen beras di Sulawesi Selatan turut berkontribusi pada pasokan beras dengan luas baku sawah 16 ribu hektare dan luas panen 2022 sekitar 26 ribu hektare terus dipacu meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas padi.

Lebih lanjut, Suwandi mengatakan pengembangan sorgum di Kabupaten Bulukumba ditargetkan 500 hektare, sedangkan di Kabupaten Pangkep minimal 100 hektare dan bisa menambah lagi. Produksi pangan terus dipacu dengan pemanfaatan sumber daya lokal. ■ **ers/E-10**

Title	Dinilai Miniatur Indonesia, IKN di Kalimantan Timur Merupakan Hal Tepat	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juli 2023	
Media	Koran Jakarta	
Page	2	
Author	Ant/S-2	

IKN Nusantara

Dinilai Miniatur Indonesia, IKN di Kalimantan Timur Merupakan Hal Tepat

SAMARINDA - Penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai merupakan hal tepat karena provinsi itu merupakan miniatur Indonesia, yakni semua suku berada di wilayah ini.

"Hebatnya lagi, meski semua suku ada di sini, provinsi ini selalu damai, tidak pernah ada gejolak luar biasa sehingga menjadi modal utama dalam pembangunan di berbagai sendi kehidupan," ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Samarinda, Firmansyah Subhan saat bincang santai bersama wartawan di Samarinda, akhir pekan kemarin.

Firmansyah menuturkan sikap masyarakat di Samarinda dan sejumlah daerah di Kaltim yang ramah ketika diajak berbincang saat di luar tugas.

Dari perbincangan dengan warga yang ditemui, dia kerap menanyakan asal kelahiran atau asal suku masyarakat Kaltim.

Firmansyah menemukan sebagian besar masyarakat Benua Etam berasal dari suku-suku yang ada nusantara, dan tetap memiliki jiwa nasionalis. Dia pun bangga dengan keanekaragaman warga Kaltim tapi tetap menampilkan persatuan dan kesatuan.

« "Hebatnya lagi, meski semua suku ada di sini, provinsi ini selalu damai, tidak pernah ada gejolak luar biasa sehingga menjadi modal utama dalam pembangunan di berbagai sendi kehidupan." »

FIRMANSYAH SUBHAN

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Samarinda

Paser Utara, Kutai Kartanegara, Balikpapan dan Samarinda yang merupakan daerah mitra serta penyangga IKN.

Berdasarkan estimasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pada 2045 jumlah penduduk di IKN akan mencapai 1,9 juta jiwa.

Jumlah ini tentu belum termasuk penduduk Kaltim yang juga bertambah, maka semua penduduk tersebut membutuhkan bahan pangan pokok yang harus dipenuhi, sehingga hal ini menjadi peluang besar untuk berusaha setidaknya di bidang pertanian dalam arti luas.

Sebelumnya, Bupati Penajam Paser Utara, Kaltim Hamdam Pongrewa, mengajak masyarakat memaknai semangat berkorban pada perayaan Idul Adha dengan bekerja keras membangun kabupaten dalam menyambut kehadiran IKN.

"Semangat berkorban semoga mampu diresapi masyarakat untuk bekerja keras bersama-sama bangun kabupaten yang lebih baik," ujar Hamdam Pongrewa di Penajam.

Seiring pembangunan IKN Indonesia baru di sebagian wilayah di daerah ini, yakni Kecamatan Sepaku, lanjut dia, harus secara bersama-sama bekerja keras mewujudkan kesejahteraan bersama.

Masyarakat bersama pemerintah kabupaten, menurut dia, harus bekerja keras mengorbankan tenaga, pikiran dan mempersiapkan SDM (sumber daya manusia) menyongsong kehadiran IKN Indonesia dari Jakarta ke Provinsi Kaltim. ■ Ant/S-2

Title	Distribusi Ayam Dikawal Ketat	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juli 2023	
Media	Koran Jakarta	
Page	5	
Author	Ers/E-10	

Stabilitas Harga | Saat Ini, Jumlah Pemotongan Ayam Masih Jauh dari Kondisi Normal

Distribusi Ayam Dikawal Ketat

Penutupan paksa RPHU Rawa Kepiting oleh ormas dapat mengancam kestabilan pasokan dan harga daging ayam, serta kestabilan ekonomi DKI Jakarta karena banyak masyarakat bergantung pada aktivitas ekonomi dari perdagangan daging ayam.

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Satgas Pangan Polri fokus mengawal ketersediaan dan pasokan ayam hidup di pasaran. Pasokan yang terganggu akan berdampak pada instabilitas harga.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, merespons insiden penutupan paksa oleh ormas tertentu di Rumah Pemotongan Hewan Unggas (RPHU) Rawa Kepiting, Jakarta Timur pada 27 Juni 2023. "Tentunya kita menyalakan insiden berujung kekerasan tersebut. Karena itu, Satgas Pangan, Dinas KPPK DKI Jakarta, dan stakeholder

terkait untuk berkoordinasi agar pemenuhan pasokan daging ayam di DKI Jakarta tetap berjalan dengan baik," ujar Arief di Jakarta, akhir pekan lalu.

Arief mendorong upaya dialogis yang dibangun antar-stakeholder untuk menemukan titik temu terhadap dinamika ketersediaan dan stabilitas daging ayam. Meski demikian, pihaknya juga mendukung langkah hukum yang ditempuh Pemprov DKI Jakarta terkait aksi penutupan paksa RPHU tersebut.

"Jakarta ini *nett consumer*, jika dilakukan penutupan paksa, dampaknya bukan saja pada kestabilan pasokan dan

harga daging ayam, tapi pada kestabilan ekonomi, karena berapa banyak masyarakat yang bergantung pada aktivitas ekonomi dari perdagangan daging ayam ini," terang Arief.

Berdasarkan pantauan Sat-

«**Tentunya kita menyalakan insiden berujung kekerasan tersebut.**»

ARIEF PRASETYO ADI
Kepala Bapanas

gas Pangan AKP Sarjono per Sabtu (1/7), aktivitas pemotongan di RPHU Rawa Kepiting perlahan kondusif dan kembali normal. Jumlah pemotongan mencapai 8.532 ekor per hari, meskipun belum sepenuhnya mencapai angka normal sekitar 30 ribu ekor per hari.

Adapun berdasarkan Panel

Harga Pangan Bapanas, rata-rata harga daging ayam ras di Provinsi DKI Jakarta dalam sepekan terakhir berada di 38.746 rupiah per kilogram (kg), lebih rendah 74 poin dari rata-rata harga daging ayam ras nasional di kisaran 38.820 rupiah per kg.

Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga daging ayam di Ibu kota, dari 28 Juni 2023 hingga 2 Juli 2023, Bapanas berkolaborasi dengan Dinas KPPK Provinsi DKI Jakarta, BUMD DKI Dharma Jaya, serta beberapa pelaku usaha di bidang perunggasan melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM) daging ayam di berbagai lokasi di Jakarta.

Arief mengatakan GPM ini merupakan respon cepat terhadap dinamika daging ayam yang cenderung mengalami peningkatan permintaan pada momentum HBKN Idul Adha. Selain itu, diharapkan adanya GPM daging ayam ini menjadi penyeimbang pasokan di mana harga daging ayam yang dijual

pada kisaran 33.000 - 35.000 rupiah per kg.

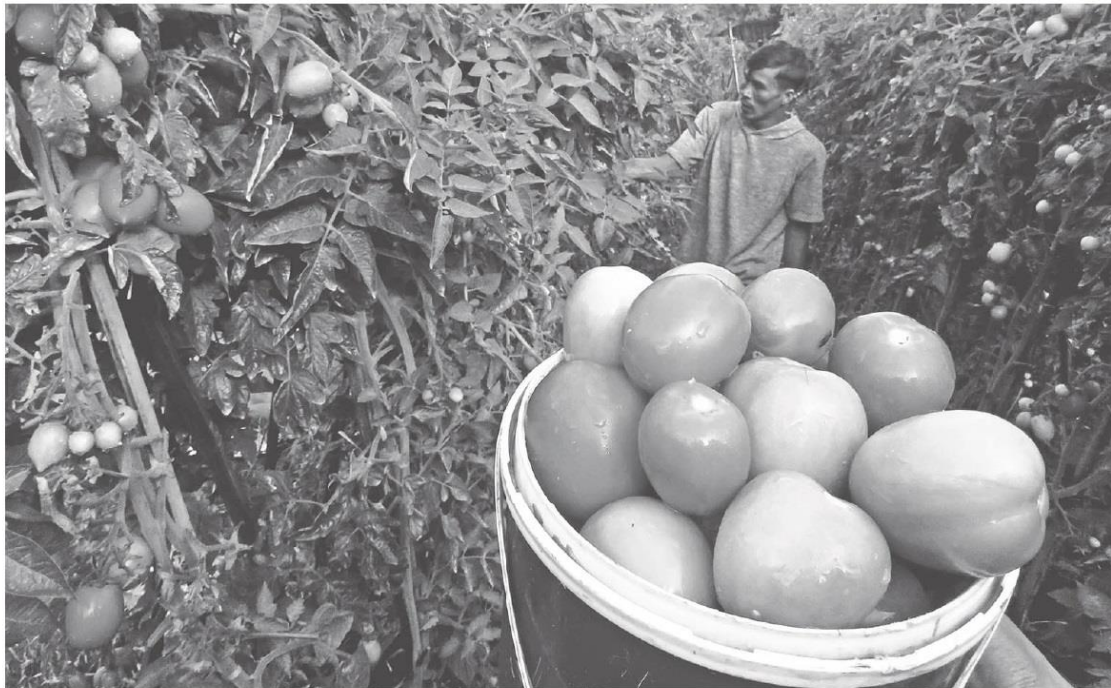
Jateng Stabil

Dalam kesempatan lainnya, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, mengatakan harga sejumlah barang kebutuhan pokok (bapak) di Salatiga, Jawa Tengah, terpantau stabil, bahkan turun. Selain itu, pasokannya pun terpantau cukup. Hal tersebut tergambar dari hasil pantauan harga-harga bapak oleh Mendag di Pasar Raya I Salatiga, Jawa Tengah, Sabtu (1/7).

"Saat ini, harga bapak di Salatiga terpantau stabil. Di sini rata-rata harga ayam 36 ribu rupiah per kilogram. Cabai merah keriting, bawang putih kating, dan bawang merah sama-sama 35 ribu rupiah per kilogram. Telur ayam antara 29-30 ribu rupiah per kilogram. Berdasarkan pantauan kami dalam dua hari terakhir, harga-harga bapak di wilayah Jawa Tengah, terutama di Semarang dan Salatiga, terpantau stabil cenderung turun," kata Mendag. ■ **ers/E-10**

Title	Harga Tomat Turun	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juli 2023	
Media	Koran Jakarta	
Page	6	
Author	Antara/Abriawan Abhe	

» Harga Tomat Turun



ANTARA/ABRIAWAN ABHE

» Petani memanen tomat di Kelurahan Pattappang, Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Minggu (2/7). Harga tomat malino di tingkat petani mengalami penurunan harga dari 10.000 rupiah per kilogram menjadi 2.500 rupiah per kilogram diakibatkan hasil panen yang melimpah.

Title	Kasus Naik,, Jakarta Tetap Bebas Rabies	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juli 2023	
Media	Koran Jakarta	
Page	8	
Author	Ant/G-1	

Penyakit Hewan

Kasus Naik, Jakarta Tetap Bebas Rabies

JAKARTA – Status Jakarta mungkin aneh karena meski banyak kasus, Dinas Kesehatan DKI menyebutkan Ibu Kota tetap berstatus bebas rabies. Setidaknya ada 206 kasus Gigitan Hewan Penularan Rabies (GHPR) Juni 2023.

Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Ngabila Salama, menjelaskan, Juni terdapat akumulasi 1.733 kasus GHPR. Ini naik 206 kasus dari total 1.527 kasus Mei 2023. "Ini laporan laporan lima RS," kata Ngabila Salama, Minggu (2/7).

Ngabila mengatakan kasus gigitan tersebut berasal dari kucing, anjing, monyet, kera, dan kelelawar. Berdasarkan data dari 194 rumah sakit dan 44 puskesmas kecamatan, Ngabila menyebutkan tidak ada sama sekali kasus rabies positif dan kematian akibat gigitan hewan tersebut.

Sejak 2004 status DKI Jakarta merupakan daerah bebas rabies yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 566/Kpts/PD.640/10/2004 tentang Pernyataan Provinsi DKI Jakarta Bebas Rabies. "Kami

mengimbau untuk pencegahan, maka anak, lansia, disabilitas, dan pengasuh hewan menghindari lokasi spesifik terdapat anjing," ujar Ngabila.

Dinkes DKI juga mengimbau masyarakat untuk bekerja sama dengan RT setempat mencegah gigitan anjing dan kucing terutama di permukiman. Pemilik hewan peliharaan kucing dan anjing secara berkala juga vaksinasi rabies. Mereka dapat berkoordinasi dengan penanggung jawab kesehatan hewan di setiap kantor kecamatan. Itu bisa dilakukan bila ada pro-

gram vaksinasi hewan gratis dari pemerintah atau berbayar di klinik hewan.

Adapun sebaran kasus GHPR Jakarta selama Januari-Juni, mayoritas korban berasal dari luar wilayah, 418 kasus. Kasus GHPR Jakarta Selatan sebanyak 154, Jakarta Pusat (156), Jakarta Barat (260), Jakarta Timur (369) dan Jakarta Utara sebanyak 376. Lalu, laporan kasus GHPR di dua rumah sakit rujukan: RSUD Tarakan 802 kasus, sedangkan di RSPI Sulianti Saroso ada 926 kasus.

Sebelumnya, Dinas Keta-

hanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta terus memperkuat kebijakan dan meningkatkan cakupan vaksinasi rabies untuk anjing, kucing dan hewan penular rabies (HPR) lainnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan vaksinasi 43.000 ekor HPR. Saat ini, realisasi kurang lebih baru 37,7 persen.

Sampai saat ini untuk vaksin rabies anjing baru 3.146 ekor, sedangkan kucing 13.280 ekor. Semoga ke depan semakin banyak vaksinasi anjing dan kucing. ■ **Ant/G-1**

Title	Kebijakan Ekspor Pertanian dan Kehutanan Direlaksasi	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juli 2023	
Media	Koran Jakarta	
Page	5	
Author	Ant/E-10	

Perdagangan Internasional

Kebijakan Ekspor Pertanian dan Kehutanan Direlaksasi

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) melonggarkan kebijakan ekspor produk pertanian dan kehutanan. Relaksasi tersebut dimaksudkan untuk menggenjot kinerja ekspor nonmigas.

“Guna mendorong kinerja ekspor, Kementerian Perdagangan telah melakukan berbagai langkah strategis, di antaranya dengan memberikan relaksasi kebijakan terhadap jenis produk tersebut,” ujar Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (1/7).

Wamendag menjelaskan, untuk produk kayu S4S (surfaced on 4 sides), E2E (eased 2 edges), dan E4 (eased 4 edges) pada 15 Juli 2023 hingga 14 Juli 2024 diberikan relaksasi luas penampang. Dari sebelumnya yang dapat diekspor maksimal 10.000 mm², menjadi 15.000 mm².

Selain itu, diberikan fasilitas subsidi pembiayaan pengurusan Laporan Surveyor (LS) untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).

Jerry menyampaikan Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menerbitkan Permendag 16 tahun 2021 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan Luar Negeri dan Permendag 19 tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Dalam per-

aturan tersebut, kegiatan ekspor termasuk produk industri kehutanan wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran

« Guna mendorong kinerja ekspor, Kementerian Perdagangan telah melakukan berbagai langkah strategis, di antaranya dengan memberikan relaksasi kebijakan terhadap jenis produk tersebut. »

JERRY SAMBUAGA
Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag)

teknis oleh surveyor independen yang memenuhi ketentuan dan telah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

“Dalam hal ini, kami mengapresiasi PT Sucofindo sebagai surveyor dalam melakukan verifikasi/penelusuran teknis untuk penerbitan Laporan Surveyor (LS) guna memastikan bahwa produk yang akan diekspor sesuai dengan ketentuan kriteria teknis, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan kriteria teknis produk industri kehutanan,” kata Jerry.

Akses Pasar

Lebih lanjut, negara tujuan utama ekspor produk industri kehutanan Indonesia adalah Tiongkok, Amerika Serikat, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Australia, Vietnam, Taiwan, dan Filipina. Menurutnya, peningkatan kinerja ekspor produk industri kehutanan ke negara tujuan ekspor utama tersebut harus dilakukan secara sungguh-sungguh, tepat, dan sistematis.

Peningkatan akses pasar utama penting dilakukan melalui penguatan fasilitasi dan informasi ekspor yang mencakup promosi ekspor, penajakan bisnis (business matching), serta penguatan perdagangan di negara tujuan ekspor. Perwakilan perdagangan yang tersebar di beberapa negara (Atase Perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center) dapat diberdayakan untuk mempromosikan komoditas ekspor Indonesia.

“Ke depan, upaya peningkatan ekspor khususnya pada produk pertanian dan kehutanan perlu dilakukan secara berkelanjutan oleh para pemangku kepentingan terkait, mengingat karakteristik yang dimiliki produk pertanian dan kehutanan Indonesia mendapat perhatian tersendiri dari pasar internasional,” ujar Jerry. ■ **Ant/E-10**

Title	Memotong Hewan	
Date	3 Juli 2023	
Media	Koran Jakarta	
Page	8	
Author	Antara/Muhammad Adimaja	

» Memotong Hewan



ANTARA/MUHAMMAD ADIMAJA

» Para petugas memotong daging hewan kurban untuk didistribusikan di halaman Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (1/7). Ada 43 sapi dan delapan kambing yang dipotong untuk dibagikan kepada masyarakat tidak mampu.

Title	Tampungan Air di NTT Diperkuat	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juli 2023	
Media	Koran Jakarta	
Page	6	
Author	Ers/E-10	

Infrastruktur Perairan

Tampungan Air di NTT Diperkuat

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menambah jumlah tampungan air di Nusa Tenggara Timur (NTT). Caranya dengan membangun Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo.

Hal itu guna mendukung program ketahanan pangan dan ketersediaan air di NTT. Terlebih lagi NTT merupakan daerah dengan intensitas hujan yang rendah. Tercatat hingga 14 Juni 2023, progres konstruksi Bendungan Mbay sudah 16,01 persen dan ditargetkan selesai akhir 2024.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, ketersediaan air menjadi kunci pembangunan di NTT yang memiliki curah hujan lebih rendah dibanding daerah lain.

"Pembangunan bendungan juga harus diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena air-nya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani," kata Basuki di Jakarta akhir pekan lalu.

Bendungan Mbay dibangun oleh Balai Wilayah Su-

ngai Nusa Tenggara II Kupang terletak di Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan yang berjarak sekitar 30 km dari pusat kota Kabupaten Nagekeo. Bendungan ini memiliki luas genangan 499,55 hektare yang bersumber dari Sungai Aesesa.

Pembangunan Bendungan Mbay sesuai kontrak telah dimulai sejak 2021 melalui dua paket pekerjaan dengan nilai kontrak 1,47 triliun rupiah. Paket I dikerjakan oleh kontraktor PT Waskita Karya (Persero) Tbk - Bumi Indah (KSO) dengan progres konstruksi 16,28

persen, sedangkan Paket II oleh PT Brantas Abipraya dengan progres 15,73 persen. Selaku Manajemen Konstruksi dikerjakan oleh PT Indra Karya - Rancang Semesta - Sabana (KSO).

Bendungan Mbay memiliki fungsi utama sebagai pengaliran irigasi di Kabupaten Nagekeo, di mana komoditas unggulannya seperti padi dan palawija yang membutuhkan sumber air irigasi. Dengan kapasitas tampung sebesar 51,74 juta meter kubik (m3), Bendungan Mbay diproyeksikan untuk pengembangan dan

peningkatan Daerah Irigasi (DI) Mbay Kanan dan Kiri seluas 5.898 hektare.

Kurangi Banjir

Bendungan ini juga memiliki manfaat lain untuk mendukung kebutuhan air baku di Nagekeo sebesar 205 liter per detik dan mengurangi debit banjir Sungai Aesesa sebesar 283,33 meter kubik per detik. Pembangunan Bendungan Mbay menambah jumlah tampungan air yang dibangun Kementerian PUPR dalam mendukung ketahanan pangan dan air di Provinsi NTT. ■ **ers/E-10**

Title	LEDAKAN SHADOW ECONOMY MENGINTAI	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juli 2023	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	11	
Author	Tegar Arief	

| TANTANGAN PENERIMAAN PAJAK |

LEDAKAN *SHADOW ECONOMY* MENGINTAI

Bisnis, JAKARTA — Otoritas pajak kembali menghadapi tantangan berat dalam mengoptimalisasi penggalan potensi penerimaan seiring dengan meningkatnya perekrutan pekerja informal yang menjadi embrio dari *shadow economy*.

Tegar Arief
tegar.arief@bisnis.com

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan dalam *Tinjauan Ekonomi, Keuangan, & Fiskal Edisi II Tahun 2023* yang dirilis akhir pekan lalu, menuliskan bahwa sektor informal di dalam negeri meningkat dari 59,97% menjadi 60,12% pada Februari tahun ini.

Celakanya, upah pekerja terendah di Tanah Air ada pada sektor pertanian, akomodasi makanan dan minuman, serta jasa lainnya yang didominasi oleh pekerja formal.

Karyawan di sektor-sektor itu biasanya tidak tercakup oleh radar fiskus lantaran upah yang diterima

di bawah batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Artinya, makin banyak pekerja informal yang terserap makin tinggi pula potensi pajak yang tidak bisa tergalai karena praktik tersebut turut serta melanggengkan eksistensi *shadow economy*.

"Pemerintah menyadari bahwa kenaikan tenaga kerja di sektor informal yang cukup signifikan patut menjadi perhatian," tulis BKF dalam laporan yang dikutip *Bisnis*, Minggu (2/7).

Dalam rangka merespons dinamika ini, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan pembukaan lapangan kerja dengan lebih masif, terutama untuk mengembalikan eksistensi pekerja dari sektor in-

formal ke formal.

Sekadar informasi, *shadow economy* berkaitan erat dengan seluruh aktivitas ekonomi baik yang dilakukan individu, rumah tangga, maupun perusahaan dengan tujuan untuk menghindari atau mengelak dari kewajiban administrasi di institusi pemerintah, termasuk perpajakan.

Biasanya, aspek ketenagakerjaan yang terindikasi ke dalam *shadow economy* berkaitan dengan administrasi hingga kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Persoalan lain adalah banyaknya sektor yang masih menggunakan tenaga kerja dengan penghasilan di bawah PTKP sehingga dapat

terlepas dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPh).

Persoalannya, PPh karyawan menjadi salah satu jenis pajak berbasis penghasilan yang menjadi andalan pemerintah untuk mengejar target senilai Rp1.718 triliun pada tahun ini.

"Yang jadi penopang yaitu PPh Pasal 21, PPh Badan, serta PPN [Pajak Pertambahan Nilai] Dalam Negeri dan PPN Impor," kata Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo, pekan lalu.

Dengan demikian, apabila problematika ini tak segera direspons maka kans untuk mendulang penerimaan menghadapi tantangan yang cukup berat.

Sementara itu, Pengamat Perpa-

jakan Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar, mengatakan ada beberapa cara untuk mengatasi permasalahan sektor informal atau *shadow economy*.

Salah satunya dengan mendigitalisasi transaksi yang memberikan kemudahan baik bagi wajib pajak maupun petugas pajak.

"Perlu didorong digitalisasi sistem pembayaran sektor informal, yang nanti ada data transaksi. Ketika data tersebut didapatkan, maka pemerintah bisa menggali potensi pajaknya," ujarnya kepada *Bisnis*.

Opsi lain adalah dengan meningkatkan kapasitas petugas pajak yang selama ini masih timpang dibandingkan dengan jumlah wajib pajak. ■

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERAN

Title	NILAI KURBAN DI JABAR TAHUN INI RP 2,3 TRILIUN	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juli 2023	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	21	
Author	Redaksi bandung@bisnis.com	

| IDULADHA 2023 |

NILAI KURBAN DI JABAR TAHUN INI RP2,3 TRILIUN

Bisnis, BANDUNG — Nilai kurban di Jawa Barat pada Iduladha 2023 mencapai Rp2,3 triliun, jumlah tersebut meningkat sekitar Rp153 miliar dibandingkan dengan Iduladha tahun lalu.

Redaksi
bandung@bisnis.com

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi menyebut angka Rp2,3 triliun tersebut merupakan nilai kurban yang tercatat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) se-Jawa Barat.

"Alhamdulillah dengan keabakan dan kepedulian masyarakat di Jawa Barat, nilai kurban tahun ini meningkat menjadi Rp2.376.280.808.352. Karena kita tahu, bahwa tahun lalu itu Rp2.224.220.162.333," ujar Dedi Supandi, pekan lalu.

Adapun untuk jumlah hewan kurban di Jawa Barat pada 2023 ini yaitu 502.553 ekor. Menurut dia, meningkatnya nilai kurban dibandingkan 2022 lalu membuktikan bahwa ekonomi masyarakat Jabar meningkat pasca pandemi Covid-19.

"Untuk tahun ini juga kan banyak masyarakat Jabar yang berkorban di luar Jabar atau di tanah suci karena hari ini ada juga yang sedang menjalankan ibadah haji," katanya.

Dedi memastikan, hewan kurban tersebut akan didistribusikan ke desa-desa di pelosok yang bahkan jarang merasakan berkorban. Sebab, Iduladha juga menjadi ajang berbagi dengan sesama.

Menurut dia, itu sebagaimana Nabi Ibrahim AS mengorbankan hewan kepada Allah SWT.

"Kita juga diajak untuk berbagi dengan sesama melalui penyembelihan hewan kurban. Dengan berbagi, kita dapat mengulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan solidaritas sosial di tengah masyarakat," kata Dedi Supandi.

Dia menilai, makna Iduladha merupakan hari peringatan peristiwa yang begitu penting dalam sejarah Islam, yaitu pengorbanan Nabi Ibrahim AS yang siap mengorbankan putranya, Nabi Ismail AS demi taat kepada perintah Allah.

"Namun, ketika Nabi Ibrahim hendak mengorbankannya, Allah menggantikannya dengan seekor domba. Hal ini menunjukkan kebesaran dan kerahmanan Allah SWT yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kita," paparnya.

Karena itu, pada momentum Iduladha masyarakat beragama Islam diajak untuk merenungkan pesan dari peristiwa tersebut. Karena melalui hikayat tersebut diberikan contoh tentang pentingnya taat kepada Allah, mulai dari kesediaan untuk berkorban, dan kepercayaan yang teguh kepada-Nya dalam setiap perjalanan hidup kita.

"Iduladha mengingatkan kita bahwa hidup ini akan penuh dengan cobaan dan ujian, namun kita harus siap menghadapinya dengan keimanan yang tak tergoyahkan," pungkasnya.

Menjelang Iduladha lalu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus aktif memantau perkembangan kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) serta cacar sapi pada hewan ternak.

Kepala UPTD Rumah Sakit Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat Yoni Darmawan mengatakan selain kedua penyakit tersebut pihaknya juga aktif memantau kasus *peste des petits ruminants* (PPR) pada kambing. "PPR baru dilaporkan terjadi di Sumatra, Jawa Barat belum ada," katanya.

Menurutnya saat ini yang tengah menunjukkan dinamika adalah kasus cacar sapi. Dari laporan yang didapat ada tiga klasifikasi

kasus tersebut.

Pertama daerah dengan kasus di bawah 50 yakni Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Cirebon, Bandung Barat, Kota Bogor, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kota Sukabumi dan Kota Cimahi.

Kemudian ada daerah dengan jumlah kasus 50-100 suspek cacar air, yakni Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Karawang dan Ciamis.

Lalu klasifikasi daerah dengan jumlah kasus di atas 100 ada di Kabupaten Bandung, Sumedang, Cianjur, Indramayu, Subang, Kabupaten Cirebon, Kuningan, Garut, Purwakarta, Majalengka dan Pangandaran. "Di Kabupaten Bandung ada 1.500 kasus," ujarnya.

Data ini menurut Yoni masih terus dikonfirmasi ke kabupaten/kota karena belajar dari kasus PMK, daerah bisa lebih cepat saat melaporkan ada kasus, sementara jika hewan ternak sudah sembuh laporan justru lambat.

"Peternak tidak lapor lagi, petugas tidak ke kandang, jadi angka yang dilaporkan harus dikonfirmasi ulang, bisa sedikit bisa lebih banyak," tuturnya.

Dari pemantauan DKPP ke sentra ternak di Kabupaten Bandung, menurutnya dari peternak yang hewan ternaknya 50 ke atas tidak lagi ditemukan kasus PMK. Namun ada satu yang terkena cacar air dan itu baru beberapa hari masuk ke kandang.

"Kasus ini terkait lalu lintas hewan yang asalnya dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, ini menjadi strategi kami mengendalikan penyakit dalam mengatur lalu lintas ternak. Tidak mudah seperti mengatur orang," tuturnya.

Tiga cek poin hewan ternak yang ada di Gunung Sindur, Bo-

gor kemudian Losari, Indramayu dan Banjar menurutnya kerap tidak dilalui para pengirim ternak dengan alasan ekonomi.

"Banyak yang enggan melalui cek poin, sekarang ada tol jadi langsung ke daerah tujuan. Di Karawang itu ada sapi dari NTT, Bali, Jawa Timur tapi mereka tidak masuk ke cek poin, langsung saja ke luar pintu tol," katanya.

Namun pihaknya terus mensosialisasikan pada kabupaten/kota agar hewan ternak dari luar Jawa Barat bisa melalui cek poin agar riwayat kesehatannya terpantau.

Meski lalu lintas ternak menjelang Iduladha meninggi, namun dari hasil pemeriksaan tim monitoring kesehatan hewan di Bandung Raya dan kabupaten/kota lainnya dipastikan tidak ada hewan kurban yang terpapar penyakit.

"Hasil pemeriksaan di Bandung Raya dan daerah lain belum ada hewan kurban yang dilaporkan terpapar dengan penyakit PMK, cacar air ataupun PPR," pungkasnya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sendiri menjamin tidak akan ada hewan yang dikurbankan tengah sakit dan terkena masalah kesehatan lain.

"Semua sehat dan bekerja berlapis memastikan hewan yang dijual [sehat], karena kalau hewan yang dijual ada hal tertentu pasti kita tindak," ujarnya.

Sementara itu, pada Iduladha tahun ini DKPP Kota Bandung menyebar sebanyak 200 petugas untuk melakukan pemeriksaan post mortem terhadap hewan kurban setelah disembelih.

Kepala DKPP Kota Bandung Gin Gin Ginanjar mengatakan pemeriksaan itu dilakukan guna memastikan hewan kurban yang akan dikonsumsi itu bebas dari penyakit. Ratusan petugas itu

diterjunkan ke 30 kecamatan di Kota Bandung.

"Jadi, ada satgas post mortem, kami sebar ke tempat-tempat penyembelihan untuk memantau dan memastikan kembali kesehatan hewan yang dipotong," kata Gin Gin saat memantau Rumah Potong Hewan (RPH) Ciroyom, Kota Bandung.

Menurutnya, para petugas itu terjun langsung ke setiap wilayah hingga tingkat rukun tetangga (RT) yang telah terdata sebagai tempat penyembelihan hewan kurban di Kota Bandung.

Gin Gin mengatakan ratusan petugas itu terdiri atas petugas DKPP Kota Bandung, serta menggandeng petugas dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI).

Sebelumnya, Gin Gin mengatakan pihaknya telah memeriksa sebanyak 16.152 hewan kurban yang akan disembelih untuk bisa memastikan kelayakan.

"Lalu, yang tidak layak, disebabkan usia yang belum mencapai umur minimal, karena hewan kurban harus memenuhi batas umur yang ditentukan," kata dia.

Sementara itu, Kepala UPT RPH Ciroyom Endang Priyatna menyebutkan pihaknya menemukan lima sapi kurban yang terdapat cacing pita pada jeroannya setelah disembelih di rumah potong hewan tersebut.

Menurutnya, petugas juga langsung memisahkan bagian jeroan yang terdapat cacing pita tersebut untuk dimusnahkan atau diadikar agar tidak dikonsumsi masyarakat.

"Bagian yang terkena ya dibuang. Kalau hanya beberapa atau sarangnya hanya sedikit, hanya yang kena saja yang kami afkir (musnahkan)," kata Endang. (K57134) ■

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN

Tittle	MOU JATIM & BENGKULU	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juli 2023	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	8	
Author	Foto Instagram	



MOU JATIM & BENGKULU:
Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah (kanan) bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menunjukkan Nota Kesepahaman atau MoU di Ruang Garuda, Gedung Daerah Balai Raya Semarak, Bengkulu, Minggu, (2/7). MoU kerja sama tersebut untuk memperkuat hubungan kedua provinsi, dengan fokus pada empat sektor utama, yaitu sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

FOTO : INSTAGRAM

Title	Bapanas dan Satgas Pangan Kawal Pasokan Ayam di Jakarta	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juli 2023	
Media	Media Indonesia	
Page	11	
Author	Fik/E-3	

Bapanas dan Satgas Pangan Kawal Pasokan Ayam di Jakarta

SEBAGAI salah satu komoditas pangan yang strategis terutama pada momentum Idul Adha, ketersediaan daging ayam di pasaran harus terpenuhi khususnya di daerah konsumen, seperti DKI Jakarta. Pasokan yang terganggu akan berdampak pada instabilitas harga.

Untuk itu, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) bersama Satgas Pangan Polri akan terus mengawal ketersediaan dan pasokan ayam hidup di pasaran. Hal tersebut diungkapkan Kepala NFA Arief Prasetyo Adi merespons adanya insiden penutupan paksa oleh ormas tertentu di RPHU (Rumah Pemotongan Hewan Unggas) Rawa Kepiting, Jakarta Timur, pada 27 Juni 2023.

“Tentunya kita menyayang-

kan insiden berujung kekerasan tersebut. Oleh karena itu, Satgas Pangan, Dinas KPKP DKI Jakarta, dan *stakeholder* terkait untuk berkoordinasi agar pemenuhan pasokan daging ayam di DKI Jakarta tetap berjalan dengan baik,” ujar Arief dalam keterangannya di Jakarta, kemarin.

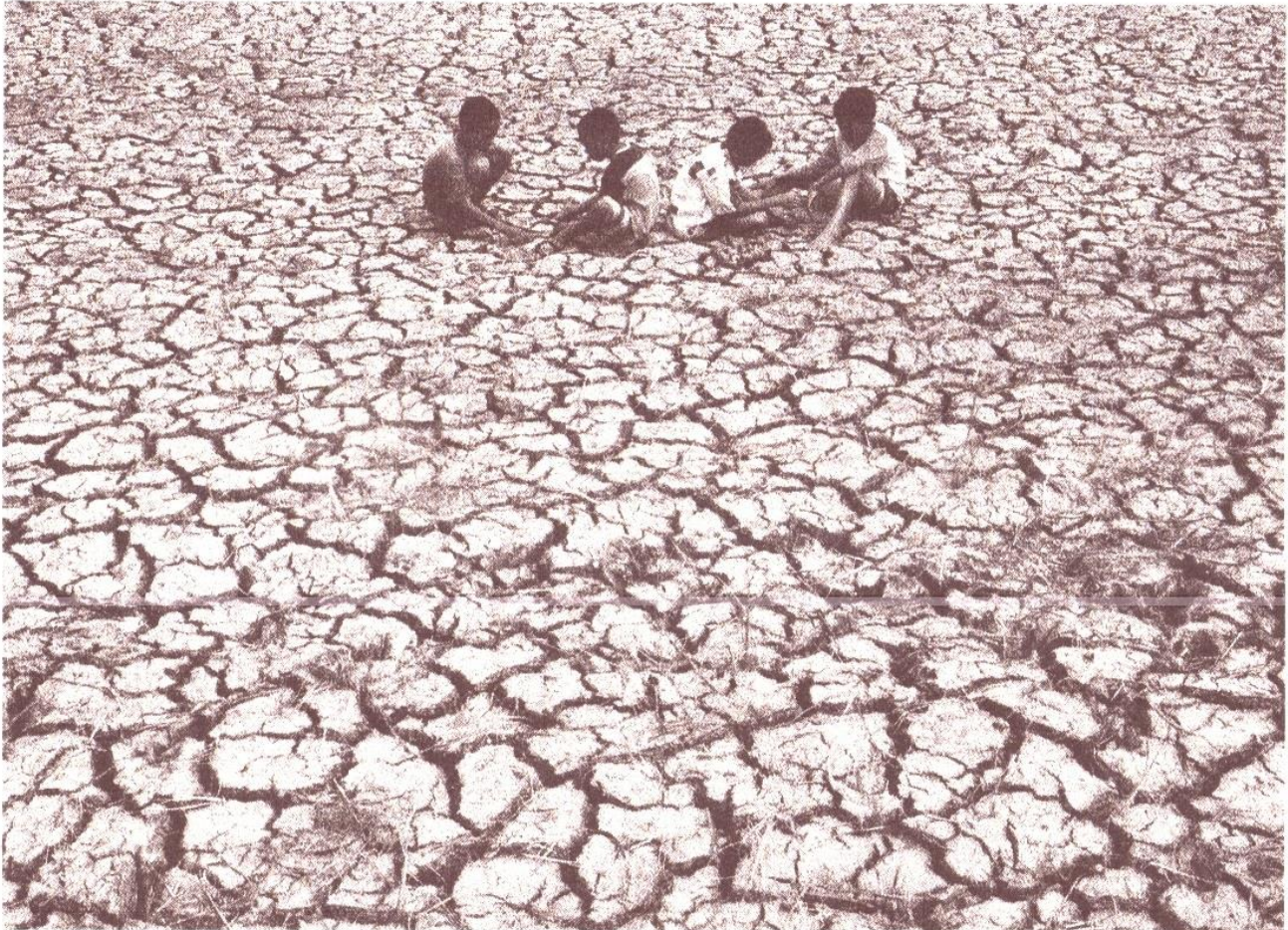
Arief mendorong upaya dialogis yang dibangun antar *stakeholder* untuk menemukan titik temu terhadap dinamika ketersediaan dan stabilitas daging ayam. Meskipun demikian, pihaknya juga mendukung langkah hukum yang ditempuh Pemprov DKI Jakarta terkait dengan aksi penutupan paksa RPHU tersebut.

“Jakarta ini *nett consumer*, jika dilakukan penutupan paksa, dampaknya bukan

saja pada kestabilan pasokan dan harga daging ayam, melainkan juga pada kestabilan ekonomi karena berapa banyak masyarakat yang bergantung pada aktivitas ekonomi dari perdagangan daging ayam ini,” jelas Arief.

Berdasarkan pantauan Satgas Pangan AKP Sarjono, per Sabtu (1/7), aktivitas pemotongan di RPHU Rawa Kepiting perlahan kondusif dan kembali normal. Jumlah pemotongan mencapai 8.532 ekor per hari, meskipun belum sepenuhnya mencapai angka normal sekitar 30 ribu ekor per hari. “Hari ini pemotongan sudah mulai kembali normal dan tentunya kita harapkan ke depannya tidak mengganggu pasokan daging ayam khususnya di DKI Jakarta,” ungkapnya. (Fik/E-3)

Title	SEBAGIAN WILAYAH INDONESIA BERPOTENSI DILANDA KEKERINGAN	
Date	3 Juli 2023	
Media	Media Indonesia	
Page	8	
Author	Antara/Arnas Padda	



ANTARA/ARNAS PADDA

SEBAGIAN WILAYAH INDONESIA BERPOTENSI DILANDA KEKERINGAN: Anak-anak bermain di area persawahan yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau di Desa Pajukukang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, pekan lalu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan sebagian wilayah Indonesia berpotensi dilanda kekeringan pada musim kemarau 2023. Hal itu akibat sejumlah wilayah akan mengalami curah hujan di bawah normal. Pada Juli 2023, curah hujan kurang dari 100 mm, berpeluang terjadi di sebagian Aceh, Sumatra Utara, sebagian Sumatra Barat, sebagian Riau, Jambi, Sumatra Selatan, sebagian Bengkulu, Lampung, Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan.

Title	Strategi Ketahanan Pangan Hadapi Kekeringan	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juli 2023	
Media	Media Indonesia	
Page	8	
Author	Naviandri	

Strategi Ketahanan Pangan Hadapi Kekeringan

Menghadapi kemarau panjang, daerah mulai mengatur strategi musim tanam agar tidak puso dan berpengaruh pada hasil panen.

NAVIANDRI
naviandri@mediaindonesia.com

MENGHADAPI cuaca kemarau ekstrem, daerah bersiaga dalamantisipasi stok pangan. Contohnya, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai kota bukan daerah produsen bahan pangan telah mengantisipasi kelangkaan pangan.

Pemkot Bandung mengandalkan program buruan SAE (sehat, alami dan ekonomis), yaitu *urban farming* yang terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga sendiri.

Program pangan buruan SAE juga bisa membantu menghadapi kondisi kekeringan karena mudah diakses, bisa di pekarangan permukiman. Dari sisi pengairan, itu mencukupi karena lahan kecil dan mudah diawasi.

"Kini buruan SAE ditingkatkan kualitas produksinya, termasuk keanekaragamannya tidak hanya fokus pada sayuran tertentu, tetapi juga tumbuhan lain seperti bawang yang punya nilai umur agak panjang. Kita sudah mulai mengenalkan pola makan sehingga masyarakat lebih bijak, sehingga bisa memenuhi persyaratan gizi seimbang," kata Kepala DKPP Kota Bandung Gin Gin Ginanjar.

Di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, saat ini

masih banyak petani yang belum tanam padi karena hujan tidak merata. "Ada daerah yang sudah mulai turun hujan, ada juga sebagian daerah yang kekeringan sehingga petani masih istirahat, baru mengolah lahan," kata Asep Ruhimat, petani di Kampung Pamijahan, Desa Paranglayang, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis.

Sementara itu, Pemkab Lamongan, Jawa Timur, menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino dengan mengintensifkan peran penyuluh pertanian serta memperbaiki manajemen air.

Pemkab juga mendorong percepatan tanam dan penggunaan varietas tahan kering/adaptif kondisi kurang air. "Kita menyiapkan sejumlah skema untuk antisipasi dampak El Nino," kata juru bicara Pemkab Lamongan, Sugeng Widodo.

Pemkab Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta para petani mengatur strategi musim kemarau kering seperti saat ini. Salah satunya ialah pasokan air untuk pertanian dan perikanan darat berpengaruh pada musim kemarau saat ini.

Kemarau saat ini justru disambut sukacita oleh petani padi organik Desa Gentungan, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar sebab mereka

bisa panen raya.

Panen padi organik menghasilkan 8 ton/hektare dengan harga gabah kering panen mencapai Rp6 ribu/kg. Luasan total padi organik Gentungan ialah 22 hektare.

Varietas genjah

Sumatra Barat pun terus diguyur hujan meski kemarau kering melanda. Kementerian Pertanian meminta tanaman padi varietas genjah cocok dengan cuaca yang tidak menentu.

"Karena musim kemarau maju, musim hujan mundur, varietas genjah sangat penting sehingga olah lahan dan indeks pertanaman tidak terganggu," ujar Sekjen Kementan Kasdi Subagiono di Padang.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Malang, Jawa Timur, menyatakan fenomena kemarau, tapi masih ada hujan merupakan anomali skala waktu harian yang belum bisa ditangkap atau terlihat pada periode waktu 1-2 bulan sebelumnya.

BMKG mengingatkan Jatim umumnya siaga kekeringan. Bahkan, kekeringan ekstrem terjadi di Probolinggo dan Situbondo.

Koordinator Bidang Observasi dan Informasi Stasiun Klimatologi Malang, Ahmad Luthfi, mengatakan fenomena iklim seperti itu menjadi tantangan dan harus diwaspadai terjadinya kekeringan. (BN/PO/AD/OL/RS/WJ/RF/AS/MR/YH/DW/YK/AU/DY/N-1)

Title	Beleid Uni Eropa Ancam Komoditas Indonesia	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juli 2023	
Media	Koran Kontan	
Page	1	
Author	Siti Masitoh, Gelvina Maria Masya, Dendi Siswanto	

Beleid Uni Eropa Ancam Komoditas Indonesia

UU Anti Deforestasi UE berpotensi menurunkan penerimaan negara hingga US\$ 5,15 miliar

Siti Masitoh, Gelvina Maria Masya, Dendi Siswanto

JAKARTA. Pasar ekspor komoditas Indonesia mendapat ancaman ganda. Selain gejolak ekonomi global, tantangan terbaru datang dari Eropa.

Hal ini setelah negara di Benua Biru yang tergabung dalam Uni Eropa (UE) menetapkan Undang-Undang Anti Deforestasi (EUDR) sejak Mei 2023. Lewat aturan tersebut, sejumlah komoditas seperti minyak sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO), kopi, daging, kayu, kakao, kedelai dan karet yang masuk pasar Uni Eropa harus terbebas dari isu dan hasil deforestasi alias penebangan hutan.

Uni Eropa adalah salah satu pasar potensial bagi produk ekspor Indonesia. Dengan ancaman tersebut, Mandiri Office of Chief Economist Group memperkirakan pemerintah berpotensi kehilangan penerimaan sebesar US\$ 5,15 miliar akibat dari beleid tersebut.

Head of Industry & Regional Research Bank Mandiri Dendi Ramdani menilai eks-

Ekspor Beberapa Komoditas Indonesia ke Pasar Uni Eropa dan Dunia*

Item produk	Ekspor ke UE	Total ekspor Indonesia
Ekspor seluruh produk Indonesia	21.532,4	291.979,1
Total produk yang terkena UU Antideforestasi	5.149,3	57.223,8
Rincian Produk yang Kena UU Antideforestasi		
Lemak nabati, binatang & produk turunannya	3.146,8	35.204,4
Karet dan produk turunannya	932,3	6.395,2
Kayu serta produk turunannya	391,1	4.660,8
Kopi, teh, jenis turunannya	367,5	1.877,3
Kertas, karton dan produk turunan kayu	298,4	4.807,4
Gula dan kembang gula	10,9	577,2
Bubur kayu dan bahan berserat lainnya	2,2	3.701,5

Keterangan: *Periode 2022, dalam US\$ juta

por komoditas yang paling terdampak adalah minyak sawit dan produk turunannya, serta minyak nabati lainnya. Tahun lalu saja, ekspor minyak sawit dan minyak nabati lainnya mencapai US\$ 3,15 miliar ke Uni Eropa.

Beberapa produk lain bisa terkena efek beleid tadi. Seperti kopi, teh, kayu dan produk turunannya, juga pulp dan kertas.

Analisis Industri Bank Mandi-

ri, Muhammad Osribillal menambahkan, selain minyak sawit, pasar Uni Eropa berkontribusi sekitar 15% dari total ekspor kakao dan karet.

Sedang komoditas kopi, ekspor ke pasar Uni Eropa hingga 20% tahun lalu. "Jadi pasar Uni Eropa cukup berpengaruh terhadap ketiga produk tersebut," kata dia kepada KONTAN.

Kalkulasi kasarnya, jika aturan Uni Eropa itu sanggup

Poin UU Anti Deforestasi Uni Eropa

- a Mengurangi gas emisi rumah kaca dan upaya deforestasi di dunia
- b Setiap produk yang masuk ke Uni Eropa harus bebas dari deforestasi yang dibuktikan dari uji kelayakan dan legislasi dari negara yang bersangkutan
- c Produk yang bebas aksi deforestasi di Uni Eropa adalah coklat, kopi, kelapa sawit, karet, kedelai, kayu dan sapi termasuk juga produk turunannya seperti kulit, cokelat, ban dan furnitur
- d Setiap operator atau pedagang yang menempatkan komoditas tersebut di pasar UE, atau mengekspornya, harus dapat membuktikan bahwa produk tersebut tidak berasal dari lahan yang baru saja digunduli atau berkontribusi terhadap degradasi hutan
- e Mulai 29 Juni 2023, operator dan pedagang memiliki waktu 18 bulan untuk menerapkan aturan baru tersebut. Adapun untuk UMKM punya masa adaptasi yang lebih lama lagi

Sumber: BPS, Trademap, Riset KONTAN

menurunkan pasar produk komoditas Indonesia sebesar 25%, maka ekspor komoditas seperti kakao, karet dan kopi bisa tergerus 3%-5%.

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA), David Sumual menyebut, penerimaan negara juga bakal kena imbasnya. Sebab, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ekspor sumber daya alam Indonesia ke pasar Eropa cukup besar yakni sekitar 45%.

Sementara ekspor Indone-

sia ke Uni Eropa hanya mencapai US\$ 21,5 miliar.

"CPO berkontribusi 15% dari ekspor kita ke Eropa. Jadi ini lumayan berpengaruh besar," ungkap dia.

David menyarankan pemerintah dan pengusaha nasional untuk segera mengantisipasi kebijakan itu. Jika belum memenuhi syarat Eropa, tak ada acara lain bagi pemerintah dan pengusaha untuk mencari pasar ekspor baru seperti ke Afrika.

Title	Dorong Ekspor Pisang	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juli 2023	
Media	Koran Kontan	
Page	12	
Author	Kontan/Fransiskus Simbolon	

Dorong Ekspor Pisang



KONTAN/Fransiskus Simbolon

Suasana di gerai penjual pisang di pasar milik PD Jaya, Tanjung Duren, Jakarta, Minggu (2/7). Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Hortikultura melaksanakan surveilans atau pengamatan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) secara rutin di berbagai sentra produksi hortikultura yang berpotensi ekspor. Pengamatan OPT dilakukan pada buah pisang yang merupakan komoditas potensial ekspor, namun sering terhambat masalah OPT.

Title	Pemerintah Kerek Harga Pembelian Gula Petani	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juli 2023	
Media	Koran Kontan	
Page	14	
Author	Ratih Waseso Aji	

Pemerintah Kerek Harga Pembelian Gula Petani

Badan Pangan Nasional menetapkan harga pembelian gula di tingkat petani Rp 12.500 per kg

Ratih Waseso Aji

JAKARTA. Sebagai upaya memperkuat stabilisasi pasokan dan harga gula konsumsi nasional, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menerbitkan Surat Edaran (SE) Bapanas Nomor 159/TS.02.02/K/6/2023 tentang Harga Pembelian Gula Kristal Putih (GKP) di Tingkat Petani.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, SE tersebut memuat pedoman tentang harga pembelian GKP di tingkat petani. Dalam SE disebutkan agar pembelian GKP di tingkat petani oleh pelaku usaha gula dilakukan dengan harga paling sedikit Rp 12.500 per kilogram (kg).

"Harga pembelian tersebut berlaku mulai pada tanggal 3 Juli 2023. Sejak tanggal pemberlakuannya, SE tersebut berfungsi sebagai dasar harga pembelian GKP oleh pelaku

usaha gula di tingkat petani," terangnya, Minggu (2/7).

Menurut Arief, penerbitan SE ini untuk percepatan penerapan harga gula konsumsi yang wajar di tingkat petani sampai dengan diterbitkannya Perubahan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 tahun 2022 yang juga mengatur tentang harga acuan pembelian GKP di tingkat produsen dan konsumen.

"Adapun, saat ini draft Perubahan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 tahun 2022 telah melalui proses harmonisasi antar kementerian dan lembaga serta masih dalam proses pengundangan," jelasnya.

Harga pembelian GKP di tingkat petani yang baru ini mengalami peningkatan dibanding ketentuan dalam Perbadan 11/2022 sebesar Rp 11.500 per kg.

Ia menjelaskan, penerbitan SE ini bertujuan untuk menja-

ga keseimbangan harga gula dari hulu hingga hilir di tengah musim giling tebu yang sedang berlangsung.

Belum sesuai

Arief mengungkapkan, kenaikan harga pembelian gula

konsumsi di tingkat petani tidak terlepas dari adanya kenaikan biaya produksi seperti biaya sewa, tenaga kerja, benih, pupuk, dan pestisida, serta biaya distribusi.

Adapun berdasarkan survei Biaya Pokok Produksi (BPP) Tebu 2023 yang dilakukan Di-

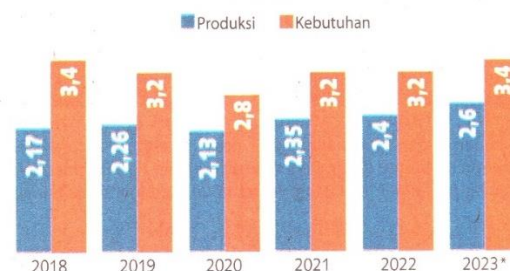
rektorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, telah terjadi kenaikan BPP dari Rp 589.229 per ton tebu menjadi Rp 650.000 per ton tebu atau naik 9,08%.

Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen menyambut baik adanya SE Nomor 159/2023 tersebut.

Dengan adanya SE tersebut setidaknya tidak ada pihak-pihak yang menjual gulanya dibawah harga yang ditetapkan SE. Pasalnya dengan adanya pihak-pihak yang menjual dibawah harga pasar yang sudah terbentuk akan menarik harga gula petani jadi turun dari harga yang terbentuk.

Meski demikian Soemitro mengakui harga dalam SE tersebut masih belum sesuai yang diharapkan. Menurutnya harga gula petani seharusnya bisa 1,5 kali dari harga beras di tingkat petani yang saat ini mencapai Rp 9.950 per kg. ■

Data Produksi dan Kebutuhan Gula Konsumsi (Juta Ton)



*) Proyeksi; Sumber: Kemperin dan Riset KONTAN

Title	Inflasi pada Juni 2023 Diperkirakan Melandai	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juli 2023	
Media	Kompas	
Page	14	
Author	BKY	

PENGENDALIAN HARGA

Inflasi pada Juni 2023 Diperkirakan Melandai

JAKARTA, KOMPAS — Tingkat inflasi Juni 2023 secara tahunan diperkirakan di bawah 4 persen. Artinya, tingkat inflasi akan mulai berada di rentang target pengendalian inflasi 2023 yang dicanangkan Bank Indonesia dan pemerintah, yakni sebesar 2-4 persen.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede berpendapat, berdasarkan hitungan tim ekonom Bank Permata, tingkat inflasi Juni 2023 diperkirakan 3,64 persen secara tahunan. Artinya, tingkat inflasi akan mulai masuk dalam rentang target pengendalian inflasi tahun ini.

"Tingkat inflasi tahunan menunjukkan tren melandai dan akan berlanjut pada Juni 2023," ujar Josua saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (1/7/2023).

Badan Pusat Statistik mencatat, tingkat inflasi Mei 2023 mencapai 4 persen secara tahunan. Angka ini menurun dibandingkan dengan inflasi April 2023 yang tercatat 4,33 persen secara tahunan.

Kendati demikian, secara bulanan, inflasi Juni 2023 diprediksi lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Mei 2023. Kenaikan ini berasal dari aspek harga pangan bergejolak, seperti daging, cabai merah, dan cabai rawit. Kenaikan harga beberapa komoditas itu di antaranya dipicu oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang hari raya Idul Adha. Selain itu, ada juga kenaikan inflasi inti.

Namun, inflasi harga diatur pemerintah (*administered price*) justru diperkirakan turun seiring dengan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi pada awal Juni 2023. Harga BBM jenis pertamax (RON 92), misalnya, turun dari Rp 13.300 per liter menjadi Rp 12.400 per liter untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Sementara jenis RON 98 harganya turun Rp 1.400 per liter menjadi Rp 13.600 per liter.

Perkiraan serupa dikemukakan ekonom Bank Mandiri, Faisal Rachman. Pihaknya memperkirakan inflasi Juni 2023 secara tahunan akan berada di bawah 4 persen setelah genap 12 bulan atau sejak Juni 2022 berada di atas 4 persen. Menurut dia, inflasi Juni 2023 akan berada pada posisi 3,65 persen secara tahunan. Dengan demikian, inflasi Juni 2023 bakal kembali berada dalam rentang target pengendalian inflasi Bank Indonesia dan pemerintah, yakni 2-4 persen.

Faisal juga memprediksi bahwa inflasi Juni secara bulanan justru meningkat menjadi 0,27 persen dibandingkan dengan Mei yang 0,09 persen. Salah satu pemicunya kenaikan permintaan barang dan jasa menjelang hari raya Idul Adha.

Ia menambahkan, tingkat inflasi kalender tahun berjalan 2023, yakni Januari-Juni 2023, diprediksi 1,37 persen atau lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 yang sebesar 3,19 persen.

Dampak El Nino

Mengenai perkiraan inflasi semester II-2023, baik Faisal maupun Josua berpendapat, tantangan pengendalian inflasi terletak pada dampak fenomena El Nino yang bisa memicu kekeringan dan penurunan produksi komoditas pangan. Apabila pasokan pangan tak mampu memenuhi permintaan, situasi itu akan berpotensi memicu lonjakan inflasi.

"Ada potensi kenaikan inflasi dari aspek harga pangan bergejolak karena ada kemungkinan gagal panen akibat kekeringan sehingga mengganggu produksi dan pasokan pangan," ucap Josua.

Untuk meningkatkan pemantauan akan pergerakan harga pangan, mulai 1 Juli 2023, BI meluncurkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dapat diakses melalui situs resmi BI pada www.bi.go.id/hargapangan.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menjelaskan, informasi harga yang disajikan mencakup komoditas pangan strategis, seperti beras, telur ayam ras, daging ayam ras, daging sapi, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, dan gula pasir. Hingga tahun 2023, survei pemantauan harga PIHPS Nasional telah mencakup empat jenis pasar, yakni pasar tradisional, pasar modern, pedagang besar, dan produsen. (BKY)

Title	Meningkatkan Produktivitas Padi di Sawah Tadah Hujan
Date	3 Juli 2023
Media	Kompas
Page	8
Author	Pradipta Pandu



Kementerian Pertanian

Meningkatkan Produktivitas Padi di Sawah Tadah Hujan

Sawah tadah hujan masih memiliki beberapa kekurangan dibandingkan sawah irigasi. Penerapan teknologi Patbo Super dapat mengoptimalkan sawah tadah hujan dan meningkatkan produktivitas padi.

Pradipta Pandu

Sawah tadah hujan saat ini menjadi lumbung kedua setelah sawah irigasi dalam memproduksi pangan, khususnya padi. Sawah tadah hujan perlu dikembangkan mengingat sekarang banyak sawah irigasi yang telah beralih fungsi.

Sawah tadah hujan merupakan jenis sawah yang sistem pengairannya sangat bergantung pada hujan dan tanpa bangunan irigasi permanen. Mengingat sistem pengairannya yang sangat bergantung pada hujan, hanya ada tiga pola tanam di lahan ini, yakni padi-padi, padi-palawija, dan padi-bera. Pola tanam untuk padi-padi kerap dilakukan di dekat aliran sungai.

Berdasarkan karakteristik biofisik, sawah tadah hujan masih memiliki kekurangan dibandingkan sawah irigasi. Beberapa kekurangan itu antara lain kandungan bahan organik dan tingkat kesuburan yang rendah, mikroorganisme kurang berkembang, produktivitas baru berkisar 4,8-5,7 ton per hektar, dan akumulasi fosfat atau pemupukan dalam tanah tinggi.

Sawah tadah hujan memiliki potensi untuk dikembangkan karena hampir 50 persen produksi padi di Asia dihasilkan dari lahan ini. Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2016 mencatat, luas lahan sawah tadah hujan di Indonesia sekitar 2,05 juta hektar. Oleh karena itu, teknologi budidaya padi di sawah tadah hujan perlu dikembangkan.

Peneliti Pusat Riset Tanaman Pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nana Sutrisna mengemukakan, pengembangan produktivitas padi dalam lahan yang pasang surut dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni meningkatkan luas areal panen dan produktivitas.

"Kunci dari teknologi tersebut adalah bagaimana mengondisikan tanah dalam keadaan aerob, tetapi terkendali. Maksudnya, lahan kering, tetapi air cukup untuk kebutuhan tanaman dan tidak membuat padi tergenang," ujar Nana dalam webinar bertajuk "Inovasi Peningkatan Produktivitas Padi Spesifik Lokasi", Selasa (27/6/2023).

Salah satu inovasi yang dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas padi di sawah tadah hujan ialah dengan menerapkan teknologi Patbo Super yang merupakan akronim dari Padi Aerob Terkendali dengan penggunaan bahan organik. Sebelum melebur ke dalam BRIN, inovasi ini dikembangkan oleh peneliti di Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) melalui Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) pada Kementerian Pertanian.

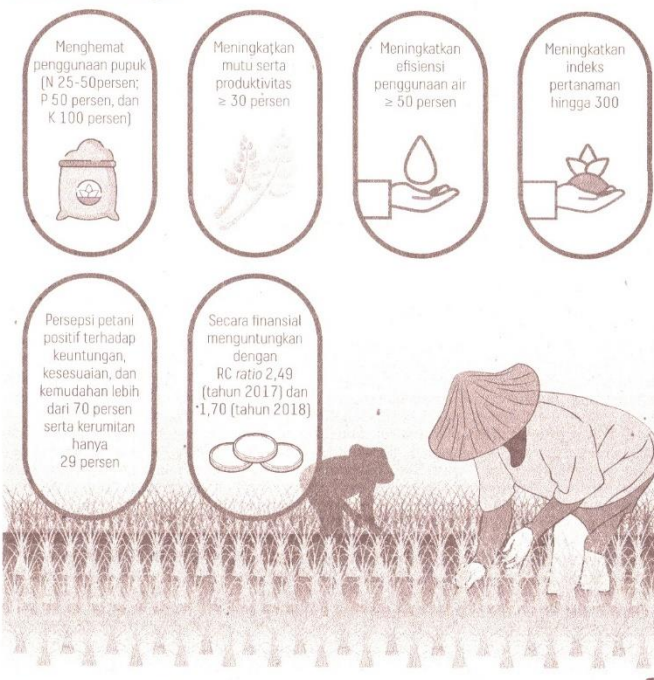
Teknologi Patbo Super

(Padi Aerob Terkendali Bahan Organik)

Patbo Super adalah paket teknologi budidaya padi spesifik lahan sawah tadah hujan dengan basis manajemen air dan penggunaan bahan organik serta mesin pertanian.

Tujuan dari penerapan teknologi ini adalah untuk meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman (IP) padi.

Teknologi Patbo Super layak secara teknis, sosial dan ekonomi serta dikembangkan di lahan sawah tadah hujan:



Sumber: Pusat Riset Tanaman Pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional, Balai M1

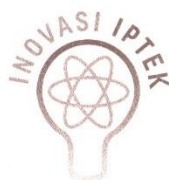
K

INFOGRAFIK: DIMAS

Nana menjelaskan, Patbo Super terinspirasi dari teknologi serupa (IPAT-BO) yang dikembangkan peneliti dari Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. Namun, teknologi IPAT-BO direkomendasikan pada lahan sawah irigasi dengan tujuan intensifikasi. Keberhasilan IPAT-BO sangat bergantung pada sistem perakaran, keanekaragaman hayati dalam ekosistem tanah, dan pasokan nutrisi berimbang.

Kondisi tersebutlah yang memungkinkan IPAT-BO dapat dilakukan di lahan sawah tadah hujan dengan melakukan sejumlah perbaikan teknologi. Beberapa perbaikan itu meliputi pengaturan irigasi atau aerob terkendali, pemberian bahan organik dengan memanfaatkan jerami padi hasil panen sebelumnya, dan pemberian pupuk hayati.

Selain itu, perbaikan teknologi lain yang diperlukan di sawah tadah hujan ialah penggunaan varietas spesifik lokasi, modifikasi jarak tanam, dan pemberian pupuk anorganik sebagai sumber unsur hara makro dan mikro sesuai kebutuhan tanaman.



"Hasil penelitian menunjukkan, pada kondisi tanah yang aerob, pertumbuhan biji atau tanaman akan lebih cepat karena ada oksigen yang masuk dan air juga tersedia. Jadi, prinsipnya adalah bagaimana mengatur irigasi agar terjadi aerob, yakni udara masuk ke pori-pori tanah, tetapi air tetap tersedia untuk kebutuhan tanaman," kata Nana.

Komponen utama

Pada intinya, Patbo Super adalah paket teknologi budidaya padi spesifik lahan sawah tadah hujan dengan basis manajemen air dan penggunaan bahan organik serta alat mesin pertanian. Tujuan dari penerapan teknologi ini ialah untuk meningkatkan produktivitas

dan indeks pertanaman (IP) padi.

Komponen utama dalam teknologi ini ialah penggunaan varietas unggul baru (VUB) kelompok amfibi dan spesifik serta bahan organik dan pupuk hayati. Varietas unggul amfibi merupakan varietas yang adaptif pada kondisi banjir dan kekeringan, seperti Situ Patenggang, Situ Bagendit Limboto, Inpari 30-31, dan Inpago 8-9. Sementara jenis varietas unggul padi spesifik antara lain ialah Inpari 38, 39, dan 41 untuk jenis tadah hujan.

Komponen utama lainnya ialah manajemen air, pengendalian gulma, dan penggunaan alat mesin pertanian untuk mengatasi kelangkaan tenaga kerja. Manajemen air dilakukan baik di tingkat makro maupun mikro sesuai kebutuhan tanaman.

Pengaturan air makro dilakukan dengan memanfaatkan sumber air dari sumur pantek, sungai, danau, atau embung dengan efisiensi mungkin. Sementara pengaturan air mikro dilakukan dengan memberikan air sesuai dengan kebutuhan melalui pengaliran basah

kering.

Menurut Nana, pengendalian gulma dalam penerapan Patbo Super juga penting. Sebab, teknologi ini akan membuat kondisi aerob sehingga mempercepat pertumbuhan padi sekaligus gulma. Oleh karena itu, pengendalian harus dilakukan sebelum gulma tumbuh dengan herbisida pratumuh. Pengendalian juga dapat dilakukan secara mekanik menggunakan power weeder apabila masih terdapat gulma yang tumbuh saat penanaman.

"Meskipun tidak wajib, untuk komponen penunjang lain, para petani bisa menerapkan sistem tanam jarak legowo. Kami melakukan dan ternyata sistem tanam jarak legowo bisa menghemat pupuk hingga 50 persen sehingga sangat meringankan petani," tutur Nana.

Hasil kajian

Teknologi Patbo Super yang dikembangkan sejak 2017 ini telah diterapkan di beberapa daerah, khususnya wilayah Jawa Barat, seperti Kabupaten Sumedang, Subang, dan Majalengka. Hasil kajian yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan teknologi ini di Ujung Jaya, Sumedang, mampu meningkatkan produktivitas padi sebesar 33,5 persen.

Selain itu, penerapan teknologi Patbo Super di sawah tadah hujan juga dapat menghemat penggunaan pupuk dan meningkatkan efisiensi penggunaan air lebih dari 50 persen dan IP hingga 300. Di sisi lain, para petani telah memberikan persepsi yang positif terhadap keuntungan, kesesuaian, dan kemudahan lebih dari 70 persen. Sementara dari aspek finansial, penerapan teknologi ini juga dinilai petani cukup menguntungkan.

"Jadi, bisa dikatakan Patbo Super sangat tepat dilakukan di sawah tadah hujan. Hanya saja masalahnya sejak 2020, penerapan teknologi ini stagnan atau tidak berkembang dan cenderung menurun serta hanya diterapkan beberapa petani. Ini perlu dilakukan kajian kembali oleh para peneliti dari aspek sosial maupun ekonomi," ungkap Nana.

Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan BRIN Yudhistira Nugraha mengatakan, peningkatan produktivitas padi masih menjadi prioritas Pemerintah Indonesia. Sebab, padi atau beras merupakan bahan makanan pokok mayoritas masyarakat Indonesia. Di sisi lain, sampai sekarang harga beras premium di pasaran cenderung masih tinggi.

Menurut Yudhistira, masalah tersebut dapat diatasi dengan cara meningkatkan produksi melalui pendekatan teknologi. "Mengingat Indonesia memiliki agroekosistem yang sangat beragam, diperlukan teknologi yang spesifik lokasi," ucapnya.

Title	Mogok dan Unjuk Rasa karena Harga Ayam
Date	3 Juli 2023
Media	Kompas
Page	16
Author	Z15



Kementerian Pertanian

Mogok dan Unjuk Rasa karena Harga Ayam

Harga ayam di Jakarta melambung dan membuat beberapa kelompok pedagang ayam di Pulogadung, Jakarta Timur, mogok dan berunjuk rasa. Keuntungan para distributor ayam terus tertekan akibat hal itu.

JAKARTA, KOMPAS — Sejak sebulan lalu harga ayam di Jakarta terus naik dan menekan keuntungan para distributor ayam. Sebagian dari mereka berunjuk rasa dan mogok berjualan selama tiga hari, hingga aksi tersebut berakhir ricuh. Kenaikan harga pakan ditegarai menjadi salah satu penyebab harga ayam tak kunjung turun.

Pemilik usaha distributor ayam Usaha Dagang (UD) Langgeng Jaya di Pulogadung, Jakarta Timur, Nanang (44), mengungkapkan, Sabtu (1/7/2023), harga ayam terus naik semenjak pertengahan Mei 2023. Kenaikan terjadi cukup signifikan, dari awalnya sekitar Rp 24.000 per kilogram, kini menjadi Rp 29.000-Rp 35.000 per kilogram. Para distributor mengaku tidak terlalu mengetahui penyebab kenaikan harga itu.

Akibat kenaikan harga tersebut, pembeli ayam yang mayoritas berasal dari pasar pun tidak mau membeli ayam dalam jumlah banyak karena berpotensi tidak terbeli. Dengan bobot ayam per ekor 1,3-1,5 kilogram, harga jual satu ayam berada dalam kisaran Rp 50.000-Rp 60.000.

Nanang mengatakan, harga tersebut cukup tinggi sehingga pihak distributor di pasar tidak berani membeli dalam jumlah banyak. Penurunan permintaan membuat ia menurunkan jumlah pasokan ayam yang dipesan dari peternak per hari. Dari awalnya empat mobil bak, kini Nanang hanya memesan ayam sejumlah dua mobil bak. Tiap-tiap mobil bak berisi 1.500 ayam.

Akibat harga yang terus melambung, Nanang dan distributor ayam lain memutuskan mogok berjualan tiga hari sejak Selasa (27/6). Mereka berharap aksi tersebut mampu menekan harga ayam. Kini, aktivitas penyaluran ayam kembali dilanjutkan, tetapi harga ayam belum juga turun.

"Tanggapan dari pihak pasar, ya, kaget mengapa ayam mahal sekali. Dikira saya ambil untung besar, padahal memang kondisinya seperti itu. Pasar tidak mau membeli banyak kalau harganya terlalu tinggi," tuturnya.

Sayangnya, aksi mogok berjualan yang terjadi pada Selasa lalu itu memicu insiden. Kelompok yang mengatasnamakan diri Komunitas Pedagang Ayam Eceran Pulogadung mendatangi Rumah Pemotongan Hewan Unggas (RPHU) Rawa Kepiting, Jakarta Timur, karena dinilai tidak mengikuti imbauan untuk ikut menghentikan aktivitas penjualannya sementara.

Permintaan tersebut tidak disambut baik oleh para pemotong ayam di sana. Seorang pelaku usaha di RPHU Rawa Kepiting, WDS (31), menjadi korban pengeroyokan imbas kejadian tersebut.

Hal yang sama diungkapkan pengusaha ayam dari UD Sawung Seto di Jakarta Timur, Edi Subandono (41). Harga ayam yang terus meroket membuat para pembeli mengurangi jumlah pesanan dari kandangnya. Mogok berjualan yang mereka lakukan beberapa waktu lalu pun tidak membawa hasil apa-apa.

Edi menyebutkan, pihak pa-

sar tidak bisa membeli ayam darinya apabila harganya Rp 50.000 per ekor. Angka tersebut dinilai terlalu mahal dan berpotensi tidak dapat dibeli masyarakat.

"Percuma mogok kemarin, tidak ada perubahan. Ini sudah lebih dari sebulan seperti ini. Semoga cepat stabil seperti dululah, bisa kembali ke Rp 20.000-Rp 23.000 per kilogram," ucapnya.

Kenaikan harga bahan pangan, termasuk daging ayam, juga terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia. Sebelumnya kenaikan harga ayam juga membuat pedagang ayam di Pasar Harjamukti di Kota Cirebon, Jawa Barat, mogok berjualan.

Harga ayam di pasar itu bisa mencapai Rp 42.000 per kilogram. Padahal, biasanya, paling mahal harganya Rp 38.000 per kilogram. Pedagang dan pembeli sama-sama mengeluh (Kompas.id, 29/6/2023).

Dalam kunjungan ke Pasar Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (27/6), Presiden Joko Widodo menemukan bahwa harga sebagian kebutuhan pokok mulai merangkak naik. Menyikapi hal itu, Presiden Joko Widodo berjanji akan mengecek penyebab utama kenaikan harga tersebut.

"Yang naik agak tinggi memang daging ayam. Biasanya di harga Rp 30.000, Rp 32.000, ini sudah mencapai Rp 50.000. Akan saya cek, mungkin ada problem di suplainya, pasokannya," ujarnya.

Kenaikan harga pakan

Peneliti di Center for Indonesian Policy Studies, Faisol Amir, mengemukakan, kenaikan

an harga ayam paling besar dipengaruhi oleh kenaikan harga pakan yang bahan baku utamanya jagung. Berdasarkan data Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) dalam Indonesian Poultry Report tahun 2013, pakan menyumbang 55,1 persen dari biaya produksi ayam. Oleh karena itu, kenaikan harga jagung paling memengaruhi kenaikan harga ayam.

Menurut data Badan Pangan Nasional (NFA), harga jagung di tingkat peternak per Sabtu (1/7) sudah mencapai Rp 6.310 per kilogram. Harga tersebut sudah melebihi harga acuan penjualan Rp 5.000 per kilogram seperti yang diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras.

Ia menyebutkan, perluasan akses terhadap pakan yang murah perlu dilakukan pemerintah. Saat ini hanya perusahaan badan usaha milik negara yang mendapat penugasan impor jagung untuk pakan. Hal ini membuat akses jagung dengan harga terjangkau bagi peternak unggas rakyat terhambat. Memperluas akses juga penting karena adanya kemunculan El Nino membuat masa tanam dan masa panen jagung dalam negeri berpotensi tidak maksimal.

"Perlu pelibatan pihak lain seperti swasta sehingga peternak dapat mengakses pakan murah dan berkualitas dengan lebih cepat," katanya. (Z15)

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERAN**

Title	Pemerintah Berupaya Jaga Harga Gula Petani	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juli 2023	
Media	Kompas	
Page	13	
Author	HEN	

Pemerintah Berupaya Jaga Harga Gula Petani

Penawaran harga lelang gula petani turun dari Rp 12.440 per kilogram jadi Rp 11.650 per kg. Untuk itu, Badan Pangan Nasional mengeluarkan surat edaran yang meminta pelaku usaha membeli gula petani Rp 12.500 per kg.

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pangan Nasional atau NFA meminta pelaku usaha gula membeli gula kristal putih di tingkat petani seharga Rp 12.500 per kilogram per 3 Juli 2023. Langkah itu diambil setelah penawaran harga lelang gula petani di musim giling tebu tahun ini turun dari Rp 12.440 per kg menjadi Rp 11.650 per kg.

Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) NFA Nomor 159/TS.02.02/K/6/2023 tentang Harga Pembelian Gula Kristal Putih di Tingkat Petani. SE tersebut ditandatangani Kepala NFA ub. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa pada 27 Juni 2023.

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan, saat ini musim giling tebu sedang berlangsung. Sembari menunggu peraturan NFA tentang harga pokok penjualan (HPP) gula kristal putih di tingkat petani dan harga acuan penjualan (HAP) gula di tingkat konsumen, NFA menerbitkan SE itu guna membantu petani tebu.

"Melalui SE itu, harga gula di tingkat petani diharapkan bisa terjaga minimal Rp 12.500 per kg sehingga penghasilan petani meningkat," kata Arief ketika dihubungi dari Jakarta, Minggu (2/7/2023).

Pemerintah sebenarnya akan mengeluarkan peraturan NFA baru tentang HPP gula di tingkat petani dan HAP gula di tingkat konsumen. Dalam peraturan baru itu, HPP gula di tingkat petani ditentukan Rp 12.500 per kg, lebih tinggi dari HPP lama Rp 11.500 per kg.

NFA juga menentukan HAP gula konsumsi sebesar Rp 14.500 per kg. Khusus wilayah Indonesia bagian timur, HAP gula konsumsi ditetapkan Rp 15.500 per kg. Kedua HAP itu naik dari tahun lalu yang masing-masing Rp 13.500 per kg dan Rp 14.500 per kg.

Dalam SE itu dijelaskan, NFA bersama kementerian/lembaga terkait sudah mengharmonisasikan Draf Perubahan Peraturan NFA Nomor 11 Tahun 2022. Saat ini, hasil revisi regulasi itu masih dalam proses pengundangan sehingga perlu ditetapkan SE.

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen mengemukakan, musim giling tebu pada tahun ini akan berlangsung selama tujuh bulan, yakni pada April hingga Oktober. Namun, setelah kurang lebih tiga bulan berjalan, harga lelang gula petani justru turun.

Pada Mei 2023, penawaran harga lelang gula petani pernah mencapai Rp 12.440 per kg. Namun, pada pertengahan hingga akhir Juni 2023, har-

Perhitungan HPP Musim Giling 2023 Usulan DPN APTRI (rupiah)

No Uraian	Penanaman tebu	Bongkar ratun*	Keterangan
1. Imbalan lahan	18.000.000	15.000.000	
2. Bibit	7.500.000	2.000.000	
3. Pupuk	9.000.000	9.000.000	
Biaya garap			
4. Traktor	3.000.000	1.000.000	
5. Got	1.500.000	1.000.000	
6. Bumbun/gulud	3.500.000	2.000.000	
7. Irigasi	2.500.000	1.500.000	
8. Tanam/sulam	5.000.000	2.000.000	
9. Klentek	4.000.000	4.000.000	
10. Pestisida/herbisida	2.000.000	2.000.000	
11. Tebang dan angkut (18.000)	14.400.000	13.500.000	
Jumlah biaya	70.400.000	53.000.000	
12. Produksi tebu per hektar	800 kuintal	750 kuintal	kuintal per hektar
13. Penerimaan tetes 3 kg per kuintal (2.400)	5.760.000	5.400.000 (2.250)	2.400
Jumlah biaya dikurangi tetes	64.640.000	47.600.000	
14. Hasil gula dengan rendemen (8%)	6.400	5.625 (7,5%)	Rata-rata 5.883
15. Gula milik petani (66%)	4.224	3.713 (66%)	3.883
Biaya pokok produksi (BPP)			13.649
Keuntungan petani 10% (termasuk bunga bank)			1.365
Harga penjualan petani (HPP) (BPP+10%)			15.014
Luas lahan: 454.000 hektar			
Total produksi nasional: 2.671.033 ton			

*Bongkar ratun adalah melakukan peremajaan tanaman (tanam ulang) yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tanaman tebu dalam ton per hektar.

Sumber: Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia



ganya turun di kisaran Rp 11.650-Rp 12.050 per kg.

"Hal itu terjadi lantaran ada pabrik gula yang menjual gula petani dengan sistem ijon atau sebelum gula diproduksi. Hal itu sebenarnya justru menguntungkan pedagang gula ketimbang pabrik dan petani. Pedagang membeli dengan harga rendah pada lelang dan menjualnya dengan harga tinggi di pasar," ujarnya.

Berdasarkan Panel Harga Pangan NFA, per 2 Juli 2023, harga rata-rata nasional gula konsumsi di tingkat eceran Rp 14.520 per kg, turun 0,14 persen dalam sepekan.

Harga gula konsumsi tertinggi berada di Papua, yakni Rp 16.250 per kg dan terendah di Jawa Timur Rp 13.280 per kg.

Permintaan petani

Menurut Soemitro, APTRI telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan NFA melalui surat permohonan pada 20 Juni 2023.

APTRI meminta pemerintah segera menetapkan HPP gula petani agar ada kepastian harga lelang gula dan melarang transaksi gula secara ijon.

Salah satu permintaan AP-

TRI itu telah dipenuhi dengan diterbitkannya SE NFA tentang Pembelian Gula Kristal Putih di Tingkat Petani. Meski belum berbentuk peraturan NFA, APTRI mengapresiasi positif upaya pemerintah itu.

"Setelah SE itu terbit dan sembari menunggu peraturan NFA tentang HPP gula di tingkat petani dan HAP di tingkat konsumen, kami berharap harga lelang gula petani bisa di atas Rp 12.500 per kg," katanya.

Soemitro juga menilai, HPP baru sebesar Rp 12.500 per kg itu sebenarnya belum ideal. HPP tersebut masih di bawah biaya pokok produksi (BPP) dan HPP gula yang diusulkan petani, masing-masing Rp 13.649 per kg dan Rp 15.014 per kg.

Kenaikan BPP tahun ini terutama dipicu lonjakan harga pupuk dan imbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Komponen BPP kebutuhan pupuk tahun ini sebesar Rp 9 juta, naik dari tahun lalu yang sebesar Rp 5 juta.

Kenaikan komponen pupuk itu terjadi sejak pemerintah mengurangi porsi pupuk bersubsidi dan akibat imbas kenaikan harga pupuk dunia.

Komponen BPP lain yang naik adalah biaya tebang angkut, benih, sewa lahan, dan

upah tenaga kerja. Biaya tebang angkut, misalnya, tahun ini telah mencapai Rp 14,4 juta, naik dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 8,4 juta.

Selain itu, Soemitro juga meminta agar gula kristal putih atau konsumsi yang diimpor pemerintah untuk stabilisasi harga dan cadangan pangan nasional tidak didistribusikan di Jawa Timur. Hal itu mengingat Jawa Timur sebagai daerah penghasil gula konsumsi terbesar di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada 2022, perkebunan tebu di Jawa Timur seluas 218.200 hektar atau 44,64 persen dari total luas perkebunan tebu di Indonesia yang mencapai 488.900 hektar.

Sementara itu, produksi gula di Jawa Timur sebanyak 1.192.034 ton. Ini mencapai 49,55 persen dari total produksi gula nasional yang sebanyak 2.405.907 ton.

Adapun NFA mencatat, pada 2023, Indonesia akan mengimpor gula sebanyak 4,641 juta ton. Kuota impor gula itu terdiri dari impor gula mentah bahan baku industri rafinasi sebanyak 3,6 juta ton, 991.000 ton gula kristal putih, dan 50.000 ton gula untuk kebutuhan khusus.

(HEN)

Title	Lakukan Intervensi Rupiah-Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juli 2023	
Media	Jawa Pos	
Page	5	
Author	Han/c7/dio	

Kebijakan Bauran Bank Indonesia Jaga Stabilitas dan Pertumbuhan

Lakukan Intervensi Rupiah-Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan

Ketidakpastian perekonomian global kembali meningkat. Risiko pertumbuhan ekonomi dunia ikut melambat. Bank Indonesia (BI) menegaskan *stance* kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasaran 3 persen pada sisa 2023 dan fokus pada penguatan stabilisasi nilai rupiah. Berikut penjelasan Gubernur BI Perry Warjiyo dalam memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan Indonesia.

The Federal Reserve (The Fed) sudah menaikkan suku bunga tinggi, tapi inflasi di Amerika Serikat (AS) masih saja belum mereda. Apa kondisi yang memengaruhi *stance* kebijakan itu?

AS adalah negara yang paling cepat melakukan vaksinasi sehingga permintaannya (terhadap komoditas makanan-minuman) cepat naik. Sedangkan suplai bergantung pada mobilitas (ekonomi) yang juga terganggu akibat ketegangan perdagangan dengan Tiongkok. Perang Rusia dengan Ukraina juga semakin mengganggu dan menurunkan agregat suplai dari sisi penawaran. *Demand* tidak bisa hanya dikendalikan oleh kenaikan suku bunga. *Fed fund rate* yang semula kami perkirakan 5,25 persen, ada kemungkinan *baseline* pada Juli nanti naik menjadi 5,5 persen.

Perekonomian Tiongkok yang lebih rendah daripada ekspektasi, bagaimana BI memandang dampaknya?

Analisis dari kantor BI di Beijing menunjukkan pembukaan kem-

bali restriksi mobilitas itu akan cepat mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi, ternyata pola pertumbuhan Tiongkok tidak seperti yang diperkirakan. Ini memang dampak perang dagang Tiongkok dan AS. Akibatnya, ekspor Tiongkok ke AS melambat.

Nah, pemulihan ekonomi yang tidak secepat perkiraan dan inflasi juga rendah membuat bank sentral Tiongkok, People's Bank of China (PBOC), mengendurkan (kebijakan) moneternya dengan menambah likuiditas dan menurunkan suku bunga (acuan). Hal itulah yang menyebabkan dolar AS (USD) menguat terhadap mata uang negara-negara berkembang. Termasuk Indonesia.

Bagaimana respons BI?

Kami merumuskan respons bauran kebijakan sesuai Undang-Undang P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan). Kami terus mengalibrasi antara tujuan stabilitas dan pertumbuhan (ekonomi), yaitu inflasi, nilai tukar, dan stabilitas keuangan.



Alhamdulillah, inflasi turun lebih cepat dari perkiraan. Bulan lalu (Mei 2023) sudah 4 persen. Bulan ini (Juni 2023) atau bulan berikutnya bisa jadi sudah di bawah 4 persen. GNPIP (Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan) dan TPPI (Tim Pengendalian Inflasi Pusat) itu betul-betul obat yang manjur untuk mengendalikan inflasi.

Strategi menjaga nilai tukar rupiah seperti apa?

Kami lebih fokus pada obat yang langsung, yaitu meningkatkan intensitas intervensi. Makanya, cadangan devisa kita pada April 2023 sebesar USD 144,2 miliar turun ke USD 139,3 miliar per akhir Mei. Kami gunakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Itulah tugas BI. Secara *year-*

to-date (YtD), rupiah menguat 4,17 persen. Lebih baik dari apresiasi rupee India dan peso Filipina. Bahkan Thai bath.

Operasi moneter valas juga terus diperkuat, termasuk optimalisasi TD (*term deposit*) valas DHE (devisa hasil ekspor) serta penambahan frekuensi dan tenor lelang TD valas jangka pendek.

BI masih terus menahan suku bunga acuan, apakah ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi?

Jamu kita banyak. BI punya jamu stimulus makroprudensial yang terus ditambah dan diperluas. Kami telah memberikan

stimulus likuiditas ke 46 sektor-sektor prioritas. Senilai Rp 108,4 triliun kepada 122 bank stimulus makroprudensial dalam bentuk insentif likuiditas.

Sebelumnya, orientasi ke sektor-sektor yang kena Covid-19. Nah, sekarang mulai sembuh, kecuali industri tekstil dan produk tekstil, kaos kaki, horeka, dan angkutan udara. Ke depan, kami akan reorientasi stimulus likuiditas itu pada sektor-sektor hilirisasi. (han/c7/dio)



Gubernur BI Perry Warjiyo

BERIKUT TARIKHAN JAWA POS

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN

Title	Harga Tomat Malino Turun	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juli 2023	
Media	Investor Daily	
Page	18	
Author	Ant	



ANT

Harga Tomat Malino Turun

Petani memanen tomat di Kelurahan Pattappang, Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Minggu (2/7/2023). Harga tomat malino ditingkat petani mengalami penurunan harga dari Rp10.000 per kilogram menjadi Rp2.500 per kilogram diakibatkan hasil panen yang melimpah.

Title	Mentan Ajak Petani Bersama Hadapi El Nino	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juli 2023	
Media	Investor Daily	
Page	18	
Author	Dho	

Mentan Ajak Petani Bersama Hadapi El Nino

JAKARTA, ID—Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat panen padi di Desa Tempas, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 26 Juni 2023, mengajak petani setempat untuk bersama-sama menghadapi dampak El Nino. “Kami hadir di Lombok Barat untuk memastikan pemerintah pusat serius dalam menangani urusan pangan di tengah ancaman dan tantangan El Nino, musim kemarau yang panjang ini. Yuk, kita hadapi ini bersama,” kata Mentan dalam keterangan Kementerian Pertanian (Kementan) yang dikutip Minggu (02/07/2023).

Mentan didampingi Wakil Bupati Lombok Barat Sumiatun panen menggunakan *combine harvester* di hamparan sawah seluas 25 hektare (ha). Menghadapi ancaman musim kemarau, di hadapan petani dan penyuluh,

Mentan mengajak melakukan percepatan tanam dan membuat penampungan-penampungan air atau embung-embung kecil. “Di beberapa tempat sudah melakukan, ini bisa digunakan (mengantisipasi kemarau). Kementan sudah memperagakan embung menggunakan teknologi membran, bahkan terpal. Hal ini sebetulnya sudah dilakukan oleh leluhur kita, termasuk yang kita lakukan dengan membuat Biosaka,” ujar Mentan.

Kementan melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) juga telah menyalurkan bantuan sarana produksi dan alat mesin pertanian kepada petani di Lombok Barat guna menghadapi El Nino tahun ini. Direktur Irigasi Pertanian Ditjen PSP Kementan Rahmanto mengatakan, bantuan yang disalurkan di Desa Kebon Ayu Penarukan Daya, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, itu, berupa rehabilitasi jaringan ter-

sier 3 unit, membangun embung pertanian bervolume 700 meter kubik, juga membran plastik 5 unit agar air di embung tidak meresap ke tanah, jalan usaha tani (JUT) 5 unit, traktor roda empat dan roda dua, *transplanter*, serta pompa air.

Selain itu, Kementan terus memotivasi petani untuk siap menghadapi El Nino. Fenomena yang diprediksi terjadi mulai Juli tahun ini akan berdampak pada penurunan produksi pertanian karena kemarau panjang. Upaya Kementan antara lain merehabilitasi jaringan irigasi tersier guna meningkatkan ketersediaan air, sehingga air yang disediakan Kementerian PUPR di waduk atau embung mengalir ke sawah. Setelah bantuan diberikan, petani diharapkan memanfaatkan agar produktivitas pertanian tetap terjaga meski ada El Nino dan krisis pangan bisa dilalui. **(dho)**

Title	Sebagian Dana PE untuk Kampanye Positif Sawit	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juli 2023	
Media	Investor Daily	
Page	18	
Author	Dho	

Sebagian Dana PE untuk Kampanye Positif Sawit

JAKARTA, ID—Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrahman menjelaskan, BPDPKS telah mengumpulkan dana pungutan ekspor (PE) sebesar Rp 186,6 triliun sejak 2015 hingga Mei 2023. Dana itu untuk membiayai program-program pengembangan sawit berkelanjutan, paling besar untuk insentif biodiesel Rp 145,56 triliun, juga untuk mendukung kegiatan promosi dan kampanye positif sawit di pasar domestik maupun internasional.

"Berbagai kegiatan pameran, konvensi, sosialisasi, diskusi, dan promosi didanai dari PE sawit. Termasuk, memitigasi kegiatan-kegiatan gugatan yang diajukan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait perlakuan sawit dalam distribusi atau perdagangan internasional," ungkap Eddy.

Dalam dialog bertajuk Menggapai Sawit Tetap Jadi Andalan Indonesia saat Dunia Penuh Ketidakpastian yang digelar pada 26 Juni 2023, Eddy menuturkan, dana PE sawit antara lain juga untuk program peremajaan sawit

rakyat (PSR) sebesar Rp 7,78 triliun seluas 282.409 hektare (ha) yang melibatkan 124.152 pekebun di 21 provinsi, serta pengadaan penyediaan sarana dan prasarana di perkebunan sawit rakyat kepada 26 lembaga pekebun dalam bentuk kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi total Rp 72,3 miliar. Selain itu, guna pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam bentuk pelatihan dan penyuluhan bagi para pekebun sawit rakyat serta pendidikan untuk keluarga pekebun dalam

bentuk dukungan beasiswa. Di sisi lain, untuk penelitian dan pengembangan Rp 519,67 miliar.

Terkait European Union Deforestation-Free Regulations (EUDR), Eddy menyatakan, dengan produktivitas yang tinggi membuat sawit sangat kompetitif di perdagangan internasional minyak nabati, ini membuat negara penghasil minyak nabati nonsawit, seperti Eropa, menghadapi tantangan luar biasa dari sisi kompetisi bisnis. "Sehingga, mereka mengam-

bil langkah seperti kampanye negatif demi menjatuhkan sawit dan mengecualikan sawit dari perdagangan nabati dunia. Berbagai isu telah digaungkan, mulai dari kesehatan, tanah gambut, hak asasi manusia (HAM), terakhir deforestasi. UE menerapkan EUDR yang mana produk-produk dari deforestasi tidak boleh masuk UE," tutur Eddy.

Indonesia-Malaysia melalui Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) telah berupaya menembus regulasi UE itu, kedua negara melakukan *joint mission* ke UE guna memper-

juangkan jangan sampai EUDR berdampak ke ekspor sawit kedua negara, saat itu BPDPKS terlibat aktif di dalamnya. "Saat itu sudah ada respons positif dari langkah dialog yang telah dilakukan, seminggu lalu delegasi UE datang bertemu Menko Perekonomian dan minggu depan (pekan ini) datang lagi delegasi UE terkait lingkungan. Mudah-mudahan perjuangan dua negara produsen sawit terbesar di dunia ini bisa berjalan baik dan masalah itu menjadi perhatian penuh mereka," jelas Eddy. **(dho)**

Title	Genjot Ekspor, Pemerintah Relaksasi Kebijakan	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juli 2023	
Media	Pikiran Rakyat	
Page	9	
Author	Pikiran Rakyat	

Genjot Ekspor, Pemerintah Relaksasi Kebijakan

JAKARTA, (PR).-

Kementerian Perdagangan terus mendorong kinerja ekspor berbagai jenis produk nonmigas, termasuk produk pertanian dan kehutanan. Kedua jenis produk tersebut merupakan produk ekspor utama Indonesia setelah bahan bakar mineral, lemak dan minyak, besi dan baja, bijih logam, serta alas kaki.

"Guna mendorong kinerja ekspor, Kementerian Perdagangan telah melakukan berbagai langkah strategis di antaranya memberikan relaksasi kebijakan terhadap jenis produk tersebut," kata Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga dalam keterangan di Jakarta, seperti dilaporkan kontributor "PR" **Satrio Widiyanto**, Sabtu (1/7/2023).

Jerry menjelaskan, untuk produk kayu S4S (*surfaced on 4 sides*), E2E (*eased 2 edges*), dan E4 (*eased 4 edges*) pada 15 Juli 2023 hingga 14 Juli 2024 diberikan relaksasi luas penampang. Dari sebelumnya yang dapat diekspor maksimal 10.000 mm², menjadi 15.000 mm².

Selain itu, diberikan fasilitasi subsidi pembiayaan pengurusan Laporan Surveyor (LS) untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).

Jerry menyampaikan, Kemendag telah menerbitkan Permendag 16 Tahun 2021



SEORANG petani memanen kopi di perkebunan, Minggu (2/7/2023). Tahun ini, nilai ekspor produk pertanian ditargetkan bisa mencapai Rp 1.000 triliun.*

tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan Luar Negeri dan Permendag 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Dalam peraturan tersebut, kegiatan ekspor termasuk produk industri kehutanan wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor independen yang memenuhi ketentuan dan

telah ditetapkan Menteri Perdagangan.

Negara tujuan utama ekspor produk industri kehutanan Indonesia adalah Cina, Amerika Serikat, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Australia, Vietnam, Taiwan, dan Filipina.

Akses pasar

Menurut dia, peningkatan kinerja ekspor produk indus-

tri kehutanan ke negara tujuan ekspor utama tersebut harus dilakukan secara sungguh-sungguh, tepat, dan sistematis.

Peningkatan akses pasar utama penting dilakukan melalui penguatan fasilitasi dan informasi ekspor yang mencakup promosi ekspor, peninjauan bisnis (*business matching*), serta penguatan perdagangan di negara tu-

juan ekspor.

Perwakilan perdagangan yang tersebar di beberapa negara (Atase Perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center) dapat diberdayakan untuk mempromosikan komoditas ekspor Indonesia.

"Ke depan, upaya peningkatan ekspor khususnya pada produk pertanian dan kehutanan perlu dilakukan secara berkelanjutan oleh para pemangku kepentingan terkait, mengingat karakteristik yang dimiliki produk pertanian dan kehutanan Indonesia mendapat perhatian tersendiri dari pasar internasional," ujar Jerry.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian telah melepas ekspor produk pertanian ke 23 negara. Total nilai ekspor mencapai Rp 25,5 miliar.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menargetkan, pada tahun ini nilai ekspor produk pertanian bisa mencapai Rp 1.000 triliun.

"Kita berharap ekspor pertanian kita bisa di atas Rp 1.000 triliun, tetapi ini berproses dan tentu semua harus menjaga kualitas dan sinergitas. Ini juga menjadi harapan presiden kepada Kementerian Pertanian agar semua komoditas strategis yang ada untuk dipersiapkan ekspor," kata Syahrul, beberapa waktu lalu.***

Title	Gubernur Khofifah Perkuat Kerjasama Pertanian, Perikanan dan Peternakan	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juli 2023	
Media	Duta Masyarakat	
Page	12 Part 1	
Author	Zal/adv	

MISI DAGANG JATIM DI BENGKULU

Gubernur Khofifah Perkuat Kerjasama Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan

BENGKULU - Mengawali misi dagang dan investasi di Provinsi Bengkulu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menandatangani Nota Kesepahaman atau MoU di Ruang Garuda, Gedung Daerah Balai Raya Semarak, Bengkulu, Minggu, (2/7/2023).

MoU kerjasama tersebut dimaksudkan untuk memperkuat hubungan kedua provinsi. Ada empat sektor utama yang menjadi fokus yaitu, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

Selanjutnya, MoU antara Pemprov Jawa Timur dengan Pemprov Bengkulu tersebut ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh 13 OPD, 8 BUMD dan 5 Asosiasi dari kedua Provinsi yang insya Allah dilaksanakan besok Senin (3/7).

"Penanaman kerjasama di empat sektor yaitu pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan ini memiliki potensi besar untuk dibangun partnership oleh kedua provinsi," ungkap Khofifah usai melakukan penandatanganan MoU.

Khofifah menjelaskan, salah satu keunggulan sektor pertanian Jatim adalah produksi beras dan kualitasnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) produksi padi di Jatim tahun 2020 tercatat 9,94 juta ton, tahun 2021 tercatat sebesar 9,789 juta ton dan tahun 2022 tercatat sebesar 9,526 juta ton Gabah Kering Giling (GKG).

Tingginya produksi padi ini salah satunya didorong oleh faktor teknik mekanisasi. Dimana padi tidak dipanen secara manual, melainkan menggunakan combine harvester, sehingga bisa mengurangi potensi loss 9 sampai 11%. Kemudian proses pasca panennya ada menggunakan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) modern baik dryer maupun Rice Milling Unit (RMU).

"Kebutuhan-kebutuhan alsintan yang secara kebijakan sesungguhnya sangat dimungkinkan bisa diputuskan untuk memberikan penguatan kepada petani dan Gapoktan dengan pinjaman skema *grace period*," ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan, proses pengeringan padi dengan menggunakan vertikal dryer maupun bed dryer selanjutnya diproses melalui RMU dapat meningkatkan kualitas beras dari medium menjadi premium. Perubahan medium ke premium, kata Gubernur Khofifah, karena kandungan airnya bisa berkurang sehingga proses pengolahan berikutnya berasnya bisa utuh kemudian warnanya putih dan seterusnya. Pada akhirnya nilai tambahnya bisa meningkat karena kualitasnya menjadi premium.

"Jadi beberapa hal yang bisa memberikan nilai tambah petani sesungguhnya secara teknologi sudah dimungkinkan, jika ada skema pinjaman *grace period* akan sangat membantu petani," tuturnya.

Terkait kebijakan *grace period* pada petani, terang Khofifah skemanya pada periode tertentu petani tidak perlu mencicil terlebih dulu. Melalui *grace period* ketika petani sudah memiliki alsintan, RMU, vertical dryer dan combine harvester, maka selama 2 tahun mereka sudah memiliki sumber income. Kemudian di tahun selanjutnya, mereka mulai mencicil.

"Itu sudah menambah nilai keuntungan bagi petani. Kalau itu dapat 2 tahun tanpa cicilan memakai sistem *grace period* rasanya ini kebijakan yang akan bisa dirasakan petani dan Gapoktan secara langsung. Mudah-mudahan ini bisa segera terpenuhi oleh pemerintah dan bisa diakses petani secara nasional," urainya.

"Ada banyak potensi yang ditemukan, dipertajam kemudian diidentifikasi secara detail di sektor pertanian yang mana ke depan bisa dijadikan kerjasama antara Provinsi Bengkulu dan Jatim," imbuhnya.

KEGIATAN misi dagang diharapkan membantu perluas jaringan pasar dan memperkenalkan produk unggulan Jawa Timur ke Bengkulu.

GUBERNUR Khofifah menandatangani MoU kerjasama Dengan Gubernur Bengkulu.

Title	Gubernur Khofifah Perkuat Kerjasama Pertanian, Perikanan dan Peternakan	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juli 2023	
Media	Duta Masyarakat	
Page	12 Part 2	
Author	Zal/adv	

Selanjutnya, Gubernur Khofifah mengatakan di sektor perkebunan komoditas kopi dan coklat marketnya luar biasa. Dari 32 jalur tol laut, sebanyak 27 tol laut melewati Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Terakhir, Khofifah mengungkapkan sektor peternakan meliputi banyak hal yang berpotensi untuk dikerjasamakan salah satunya daging sapi potong di Jawa Timur.

Terlebih, di Jatim saat ini polulasi sapi terdapat lebih dari 5 juta ekor sapi. Ini karena, di Jatim terdapat BBIB (Balai Besar Inseminasi Buatan) milik Kementerian Pertanian yang berada di Singosari Malang. Ini merupakan potensi yang besar apabila bisa dilakukan kerjasama pelatihan agar bisa swasembada daging selanjutnya ekspor pasar ke luar negeri.

“Kultur beternak sudah jadi, teknologi sudah siap. Tinggal bagaimana kekuatan ekonomi baru masyarakat kita untuk melahirkan peternak handal,” ujarnya.

Dari ketiga sektor yang disebutkan, Gubernur Khofifah mengaku ada potensi yang sangat besar untuk dilakukan kolaborasi dan kerjasama antara kedua provinsi. Hasilnya, tidak sekadar meningkatkan roda perekonomian, lebih dari itu mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat.

“Peternakan, pertanian, perikanan dan perkebunan merupakan item yang mampu dibangun partnership untuk kemudian

dilakukan penajaman dan identifikasi di masing-masing sektor,” pungkasnya.

Sementara itu, pelaksanaan misi dagang dan investasi Provinsi Jawa Timur di Bengkulu yang akan digelar Senin (3/7), diharapkan Gubernur Khofifah akan menjadi momentum untuk menemukenali, mempertajam serta mengidentifikasi berbagai sektor sehingga mampu menumbuhkan roda perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di kedua provinsi.

“Kegiatan misi dagang diharapkan dapat membantu memperluas jaringan pasar dan memperkenalkan produk unggulan Jawa Timur ke Bengkulu. Sehingga dapat memperkuat potensi perdagangan untuk menunjang perkembangan dan kemajuan di Bengkulu,” tandasnya.

Inisiatif Gubernur Khofifah untuk menjalin kerjasama di empat sektor itu di respon baik oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Terlebih, lewat misi dagang, kata dia, menjadi ajang mempertemukan trader dan buyer. Kolaborasi ini dipercaya saling menguatkan potensi yang

dimiliki oleh kedua provinsi.

“Misi dagang merupakan instrumen, tapi tidak sekadar bicara bisnis, tapi jauh dari itu yakni bentuk merajut kepentingan anak bangsa,” ujarnya.

Menurutnya ketiga sektor tersebut terbuka peluang untuk dilakukan kerjasama, utamanya di sektor perkebunan mengingat Bengkulu penghasil kopi robusta terbaik secara nasional.

“Bisa dikombinasikan dengan pola-pola semacam itu. Kalau kopinya Bengkulu dan Jatim menyatu, maka masyarakatnya juga semakin menyatu. Termasuk sektor pertanian juga bisa dilakukan karena produksi padi Bengkulu gabahnya surplus,” tutupnya.

●zal/adv

FOTO-FOTO: DUTA/ISTIMEWA



MISI DAGANG :
Gubernur Khofifah Indar Parawansa Perkuat Kerjasama di sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan.

Title	Gubernur Khofifah MoU dengan Gubernur Bengkulu	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juli 2023	
Media	Harian Bangsa	
Page	7	
Author	Dev/rus	

Gubernur Khofifah MoU dengan Gubernur Bengkulu

Perkuat Kerjasama Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan

Bengkulu - HARIAN BANGSA

Mengawali misi dagang dan investasi di Provinsi Bengkulu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menandatangani Nota Kesepahaman atau MoU di Ruang Garuda, Gedung Daerah Balai Raya Semarak, Bengkulu, Minggu, (2/7).

MoU tersebut, dimaksudkan untuk memperkuat hubungan kedua provinsi. Dimana, terdapat empat sektor utama yang menjadi fokus yaitu sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

Selanjutnya, MoU antara Pemprov Jawa Timur dengan Pemprov Bengkulu tersebut ditandatangani dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh 13 OPD, 8 BUMD dan 5 Asosiasi dari kedua Provinsi yang Insya Allah dilaksanakan Senin (3/7).

"Penajaman kerjasama di empat sektor yaitu pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan ini memiliki potensi besar untuk dibangun partner-

ship oleh kedua provinsi," ungkap Khofifah usai melakukan penandatanganan MoU.

Khofifah menjelaskan, salah satu keunggulan sektor pertanian Jatim adalah produksi beras dan kualitasnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) produksi padi di Jatim tahun 2020 tercatat 9,94 juta ton, tahun 2021 tercatat sebesar 9,789 juta ton dan tahun 2022 tercatat sebesar 9,526 juta ton Gabah Kering Giling (GKG).

Tingginya produksi padi ini salah satunya didorong oleh faktor teknik mekanisasi. Dimana padi tidak dipanen secara manual, melainkan menggunakan combine harvester sehingga bisa mengurangi potensi loss 9 sampai 11 persen. Kemudian proses pasca panennya ada menggunakan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) modern baik dryer maupun Rice Milling Unit (RMU).

"Kebutuhan-kebutuhan alsintan yang secara kebijakan sesungguhnya sangat dimungkinkan bisa diputuskan untuk memberikan penguatan kepada petani



Gubernur Khofifah menandatangani MoU dengan Gubernur Bengkulu.

dan Gapoktan dengan pinjaman skema grace period," ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan, proses pengeringan padi dengan menggunakan vertikal dryer maupun bed dryer selanjutnya diproses melalui RMU dapat meningkatkan kualitas beras dari medium menjadi premium. Perubahan medium ke premium, kata Gubernur Khofifah, karena kandungan airnya bisa berkurang sehingga proses pengolahan berikutnya berasnya bisa utuh kemudian warnanya putih dan seterusnya. Pada akhirnya nilai tambahnya bisa meningkat karena kualitasnya menjadi premium.

"Jadi beberapa hal yang bisa memberikan nilai tambah

petani sesungguhnya secara teknologi sudah dimungkinkan, jika ada skema pinjaman grace period akan sangat membantu petani," tuturnya.

Terkait kebijakan grace period pada petani, terang Khofifah skemanya pada periode tertentu petani tidak perlu mencicil terlebih dulu. Melalui grace period ketika petani sudah memiliki alsintan, RMU, vertikal dryer dan combine harvester, maka selama 2 tahun mereka sudah memiliki sumber income. Kemudian di tahun selanjutnya, mereka mulai mencicil.

"Itu sudah menambah nilai keuntungan bagi petani. Kalau itu dapat 2 tahun tanpa cicilan memakai sistem grace period

rasanya ini kebijakan yang akan bisa dirasakan petani dan Gapoktan secara langsung. Mudah-mudahan ini bisa segera terpenuhi oleh pemerintah dan bisa diakses petani secara nasional," urainya.

"Ada banyak potensi yang ditemukan, dipertajam kemudian diidentifikasi secara detail di sektor pertanian yang mana ke depan bisa dijadikan kerjasama antara Provinsi Bengkulu dan Jatim," imbuhnya.

Selanjutnya, Gubernur Khofifah mengatakan di sektor perkebunan komoditas kopi dan coklat marketnya luar biasa. Dari 32 jalur tol laut, sebanyak 27 tol laut melewati Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Terakhir, Khofifah mengungkapkan sektor peternakan meliputi banyak hal yang berpotensi untuk dikerjasamakan salah satunya daging sapi potong di Jawa Timur.

Terlebih, di Jatim saat ini populasi sapi terdapat lebih dari 5 juta ekor sapi. Ini karena, di Jatim terdapat BBIB (Balai Besar Inseminasi Buatan) milik Kementerian Pertanian yang berada di Singosari Malang. Ini merupakan potensi yang besar apabila bisa dilakukan kerjasama pelatihan agar bisa swasembada daging selanjutnya ekspor pasar ke luar negeri. (dev/rus)

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN**

Title	Harga Pembelian GKP Tingkat Petani Rp12.500 Per Kg	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juli 2023	
Media	Nusa Bali	
Page	10	
Author	Nusa Bali	

Badan Pangan Nasional Terbitkan SE Harga Pembelian GKP Tingkat Petani Rp12.500 Per Kg

JAKARTA, NusaBali

Sebagai upaya memperkuat stabilisasi pasokan dan harga gula konsumsi nasional, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menerbitkan Surat Edaran (SE) Badan Pangan Nasional Nomor 159/TS.02.02/K/6/2023 tentang Harga Pembelian Gula Kristal Putih (GKP) di Tingkat Petani.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, mengatakan, SE tersebut memuat pedoman tentang harga pembelian Gula Kristal Putih (GKP) di tingkat petani.

Dalam SE disebutkan agar pembelian GKP di tingkat petani oleh pelaku usaha gula dilakukan dengan harga paling sedikit Rp 12.500 per kilogram.

"Harga pembelian tersebut berlaku mulai pada tanggal 3 Juli 2023. Sejak tanggal pemberlakuannya, SE tersebut berfungsi sebagai dasar harga pembelian GKP oleh pelaku usaha gula di tingkat petani," terangnya seperti dilansir kontan.co.id, Minggu (2/7).

Menurut Arief, penerbitan SE ini untuk percepatan penerapan harga gula konsumsi yang wajar di tingkat petani sampai dengan diterbitkannya Perubahan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 tahun 2022 yang juga mengatur tentang harga acuan pembelian GKP di tingkat produsen dan konsumen.

"Adapun, saat ini draft Perubahan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 tahun 2022 telah melalui proses harmonisasi antar Kementerian dan Lembaga serta masih dalam proses pengundangan," jelasnya.

Harga pembelian GKP di tingkat petani yang baru ini mengalami peningkatan dibanding ketentuan sebelumnya yang mengacu kepada Peraturan Nomor 11 Tahun 2022 atau sebelum rencana perubahan.

"Harga pembelian di tingkat petani atau produsen naik sebesar Rp 1.000 per kilogram, dari Rp 11.500 per kilogram menjadi Rp 12.500 per kilogram," ujarnya.

Ia menjelaskan, penerbitan SE ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan harga gula dari hulu hingga hilir di tengah musim giling tebu yang sedang berlangsung.

"Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan petani tebu khususnya di tengah musim giling yang sedang berlangsung," kata Arief.

Arief mengungkapkan, kenaikan harga pembelian gula konsumsi di tingkat petani tidak terlepas dari adanya kenaikan biaya produksi seperti biaya sewa, tenaga kerja, benih, pupuk, dan pestisida, serta biaya distribusi.

Adapun berdasarkan survei Biaya Pokok Produksi (BPP) Tebu 2023 yang dilakukan

Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, telah terjadi kenaikan BPP dari Rp 589.229 per ton tebu menjadi Rp 650.000 per ton tebu atau naik 9,08%.

"Untuk itu, diperlukan penyesuaian agar keseimbangan dan kewajaran harga di tingkat petani, penggilingan, pedagang, dan konsumen, terjaga sesuai harga keekonomian saat ini, sebagai mana arahan Bapak Presiden," ucapnya.

Dalam hal proses pembahasan penyesuaian harga gula konsumsi ini, Arief memastikan, Badan Pangan Nasional mendengar masukan dan aspirasi dari seluruh stakeholder perguruan nasional, seperti Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia (APTRI), Asosiasi Gula Indonesia (AGI), Gabungan Produsen Gula Indonesia (GAPGINDO), serta pelaku usaha.

Terkait besaran harga yang ditetapkan, Arief menjelaskan, sebelumnya pembahasan telah dilakukan dalam beberapa kali putaran dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait seperti Kantor Staf Presiden, Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, ORI, Badan Pusat Statistik (BPS), Satgas Pangan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Asosiasi, serta pelaku usaha gula.

"Jadi harga pembelian GKP di tingkat petani sebesar Rp 12.500 per kilogram ini telah melalui proses diskusi yang panjang dan pembahasannya melibatkan seluruh stakeholder gula nasional. Kita lakukan agar memperoleh hasil yang adil bagi semua pihak," tuturnya.

Arief menambahkan, selain itu, penetapan harga tersebut juga langkah strategis untuk meningkatkan daya saing industri gula nasional secara berkelanjutan.

Dimana dengan pendapatan yang baik diharapkan minat masyarakat atau petani tebu untuk menanam dan meningkatkan produksi tebunya semakin tinggi, sehingga dapat mendorong peningkatan ketersediaan bahan baku tebu yang berdampak pada peningkatan produksi gula nasional.

Untuk memastikan agar pemberlakuan harga pembelian di tingkat petani tersebut berjalan dengan baik dan presisi, Arief menyampaikan, Badan Pangan Nasional telah berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri terkait langkah-langkah sosialisasi serta pengawasan implementasi harga di lapangan.

"Badan Pangan Nasional telah bersurat kepada Satgas Pangan Polri meminta dukungan dan bantuan dalam hal sosialisasi dan pengawasan kebijakan harga tersebut di lapangan," ujarnya. 📄

Title	Jatim dan Bengkulu Sepakat Kerja Sama Empat Sektor	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juli 2023	
Media	Surabaya Pagi	
Page	2	
Author	K-1/na	

Jatim dan Bengkulu Sepakat Kerja Sama Empat Sektor

SURABAYAPAGI, Bengkulu - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menandatangani nota kesepahaman atau MoU di Ruang Garuda, Gedung Daerah Balai Raya Semarak, Bengkulu, Minggu (2/7). Hal ini juga mengawali misi dagang dan investasi di Provinsi Bengkulu.

MoU kerjasama tersebut bertujuan untuk memperkuat hubungan kedua provinsi. Di mana, terdapat empat sektor utama yang menjadi fokus yaitu sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

Selanjutnya, MoU antara Pemprov Jawa Timur dengan Pemprov Bengkulu tersebut ditandatangani dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh 13 OPD, 8 BUMD dan 5 Asosiasi dari kedua Provinsi yang Insya Allah dilaksanakan pada Senin (3/7).

"Penajaman kerjasama di empat sektor yaitu pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan ini memiliki potensi besar untuk dibangun partnership oleh kedua provinsi," ungkap Khofifah usai melakukan penandatanganan MoU.

Khofifah menjelaskan, salah satu keunggulan sektor pertanian Jatim adalah produksi beras dan kualitasnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) produksi padi di Jatim tahun 2020 tercatat 9,94 juta ton, tahun 2021 tercatat sebesar 9,789 juta ton dan tahun 2022 tercatat sebesar 9,526 juta ton Gabah Kering Giling (GKG).

Selanjutnya, Gubernur Khofifah mengatakan di sektor perkebunan komoditas kopi dan coklat marketnya luar biasa. Dari 32 jalur tol laut, sebanyak 27 tol laut melewati Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Terakhir, Khofifah mengungkapkan sektor peternakan meliputi banyak hal yang berpotensi untuk dikerjakannya salah satunya daging sapi potong di Jawa



SPHUMAS PEMPROV. JATIM

Penandatanganan nota kesepahaman atau MoU di Ruang Garuda, Gedung Daerah Balai Raya Semarak, Bengkulu, Minggu (2/7/2023).

Timur. Terlebih, di Jatim saat ini populasi sapi terdapat lebih dari 5 juta ekor sapi. Ini karena, di Jatim terdapat BBIB (Balai Besar Inseminasi Buatan) milik Kementerian Pertanian yang berada di Singosari Malang.

Ini merupakan potensi yang besar apabila bisa dilakukan kerjasama pelatihan agar bisa swasembada daging selanjutnya ekspor pasar ke luar negeri. "Kultur beternak sudah jadi, teknologi sudah siap. Tinggal bagaimana kekuatan ekonomi baru masyarakat kita untuk melahirkan peternak handal," ujarnya.

Dari ketiga sektor yang disebutkan, Gubernur Khofifah mengatakan ada potensi yang sangat besar untuk dilakukan kolaborasi dan kerjasama antara kedua provinsi. Hasilnya, tidak sekadar meningkatkan roda perekonomian, lebih dari itu mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat.

"Peternakan, pertanian, perikanan dan perkebunan merupakan item yang mampu dibangun partnership untuk kemudian dilakukan penajaman dan identifikasi di masing-masing sektor," pungkasnya.

Sementara itu, pelaksanaan misi dagang dan investasi Provinsi Jawa Timur di Bengkulu yang akan digelar Senin (3/7), di hara-

apkan Gubernur Khofifah akan menjadi momentum untuk menemukan, mempertajam serta mengidentifikasi berbagai sektor sehingga mampu menumbuhkan roda perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di kedua provinsi.

"Kegiatan misi dagang diharapkan dapat membantu memperluas jaringan pasar dan memperkenalkan produk unggulan Jawa Timur ke Bengkulu. Sehingga dapat memperkuat potensi perdagangan untuk menunjang perkembangan dan kemajuan di Bengkulu," tandasnya.

Inisiatif Gubernur Khofifah untuk menjalin kerjasama di empat sektor itu di respon baik oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Terlebih, lewat misi dagang, kata dia, menjadi ajang mempertemukan trader dan buyer. Kolaborasi ini dipercaya saling menguatkan potensi yang dimiliki oleh kedua provinsi.

"Misi dagang merupakan instrumen, tapi tidak sekadar bicara bisnis, tapi jauh dari itu yakni bentuk merajut kepentingan anak bangsa," ujarnya.

Menurutnya ketiga sektor tersebut terbuka peluang untuk dilakukan kerjasama, utamanya di sektor perkebunan mengingat Bengkulu penghasil kopi robusta terbaik secara nasional. ■ **k-1/na**

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	Khofifah Perkuat Kerjasama Jatim-Bengkulu	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juli 2023	
Media	Harian Bhirawa	
Page	1 Part 1	
Author	Tam.iib	

Khofifah Perkuat Kerjasama Jatim-Bengkulu

■ Teken MoU Empat Sektor di Awal Misi Dagang

Pemprov, Bhirawa

Mengawali misi dagang dan investasi di Provinsi Bengkulu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menandatangani Nota Kesepahaman atau MoU di Ruang Garuda, Gedung Daerah Balai Raya Semarak, Bengkulu, Minggu, (2/7)

MoU kerjasama tersebut dimaksudkan untuk memperkuat hubungan kedua provinsi. Dimana, terdapat empat sektor utama yang menjadi fokus yaitu sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

“Penajaman kerjasama di empat sektor yaitu pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan ini memiliki potensi besar untuk dibangun partnership oleh kedua provinsi,” ungkap Khofifah usai melakukan

penandatanganan MoU.

Khofifah menjelaskan, salah satu keunggulan sektor pertanian Jatim adalah produksi beras dan kualitasnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) produksi padi di Jatim tahun 2020 tercatat 9,94 juta ton, tahun 2021 tercatat sebesar 9,789 juta ton dan tahun 2022 tercatat sebesar 9,526 juta ton Gabah Kering Giling (GKG).

Tingginya produksi padi ini

» ke halaman 11



Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menandatangani Nota Kesepahaman atau MoU di Ruang Garuda, Gedung Daerah Balai Raya Semarak, Bengkulu.

Title	Khofifah Perkuat Kerjasama Jatim-Bengkulu
Date	3 Juli 2023
Media	Harian Bhirawa
Page	1 Part 2
Author	Tam.iib



Kementerian Pertanian

Khofifah Perkuat Kerjasama Jatim-Bengkulu

● Sambungan hal 1

salah satunya didorong oleh faktor teknik mekanisasi. Dimana padi tidak dipanen secara manual, melainkan menggunakan combine harvester sehingga bisa mengurangi potensi loss 9 sampai 11%. Kemudian proses pasca panennya ada menggunakan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) modern baik dryer maupun Rice Milling Unit (RMU).

“Kebutuhan-kebutuhan alsintan yang secara kebijakan sesungguhnya sangat dimungkinkan bisa diputuskan untuk memberikan penguatan kepada petani dan Gapoktan dengan pinjaman skema grace period,” ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan, proses pengeringan padi dengan menggunakan vertikal dryer maupun bed dryer selanjutnya diproses melalui RMU dapat meningkatkan kualitas beras dari medium menjadi premium. Perubahan medium ke premium, kata Gubernur Khofifah, karena kandungan airnya bisa berkurang sehingga proses pengolahan berikutnya berasnya bisa utuh kemudian warnanya putih dan seterusnya. Pada akhirnya nilai tambahnya bisa meningkat karena kualitasnya menjadi premium.

“Jadi beberapa hal yang bisa memberikan nilai tambah petani sesungguhnya secara teknologi sudah dimungkinkan, jika ada skema pinjaman grace period akan sangat membantu petani,” tuturnya.

Terkait kebijakan grace period pada petani, terang Khofifah skemanya pada periode tertentu petani tidak perlu mencicil terlebih dulu. Melalui grace period ketika petani sudah memiliki alsintan, RMU, vertical dryer dan combine harvester, maka selama 2 tahun mereka sudah memiliki sumber income. Kemudian di tahun selanjutnya, mereka mulai mencicil.

“Itu sudah menambah nilai keun-

tungan bagi petani. Kalau itu dapat 2 tahun tanpa cicilan memakai sistem grace period rasanya ini kebijakan yang akan bisa dirasakan petani dan Gapoktan secara langsung. Mudah-mudahan ini bisa segera terpenuhi oleh pemerintah dan bisa diakses petani secara nasional,” urainya.

“Ada banyak potensi yang ditemukan, dipertajam kemudian diidentifikasi secara detail di sektor pertanian yang mana ke depan bisa dijadikan kerjasama antara Provinsi Bengkulu dan Jatim,” imbuhnya.

Selanjutnya, Gubernur Khofifah mengatakan di sektor perkebunan komoditas kopi dan coklat marketnya luar biasa. Dari 32 jalur tol laut, sebanyak 27 tol laut melewati Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Terakhir, Khofifah mengungkapkan sektor peternakan meliputi banyak hal yang berpotensi untuk dikerjasamakan salah satunya daging sapi potong di Jawa Timur.

Terlebih, di Jatim saat ini polulasi sapi terdapat lebih dari 5 juta ekor sapi. Ini karena, di Jatim terdapat BBIB (Balai Besar Inseminasi Buatan) milik Kementerian Pertanian yang berada di Singosari Malang. Ini merupakan potensi yang besar apabila bisa dilakukan kerjasama pelatihan agar bisa swasembada daging selanjutnya ekspor pasar ke luar negeri.

“Kultur beternak sudah jadi, teknologi sudah siap. Tinggal bagaimana kekuatan ekonomi baru masyarakat kita untuk melahirkan peternak handal,” ujarnya.

Dari ketiga sektor yang disebutkan, Gubernur Khofifah mengaku ada potensi yang sangat besar untuk dilakukan kolaborasi dan kerjasama antara kedua provinsi. Hasilnya, tidak sekadar meningkatkan roda perekonomian, lebih dari itu mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat.

“Peternakan, pertanian, perikanan dan perkebunan merupakan item yang mampu dibangun partnership untuk kemudian dilakukan penajaman dan identifikasi di masing-masing sektor,” pungkasnya.

Sementara itu, pelaksanaan misi dagang dan investasi Provinsi Jawa Timur di Bengkulu yang akan digelar Senin (3/7), diharapkan Gubernur Khofifah akan menjadi momentum untuk mengenali, mempertajam serta mengidentifikasi berbagai sektor sehingga mampu menumbuhkan roda perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di kedua provinsi.

“Kegiatan misi dagang diharapkan dapat membantu memperluas jaringan pasar dan memperkenalkan produk unggulan Jawa Timur ke Bengkulu. Sehingga dapat memperkuat potensi perdagangan untuk menunjang perkembangan dan kemajuan di Bengkulu,” tandasnya.

Inisiatif Gubernur Khofifah untuk menjalin kerjasama di empat sektor itu di respon baik oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Terlebih, lewat misi dagang, kata dia, menjadi ajang pertemuan trader dan buyer. Kolaborasi ini dipercaya saling menguatkan potensi yang dimiliki oleh kedua provinsi. “Misi dagang merupakan instrumen, tapi tidak sekadar bicara bisnis, tapi jauh dari itu yakni bentuk merajut kepentingan anak bangsa,” ujarnya.

Menurutnya ketiga sektor tersebut terbuka peluang untuk dilakukan kerjasama, utamanya di sektor perkebunan mengingat Bengkulu penghasil kopi robusta terbaik secara nasional. “Bisa dikombinasikan dengan pola-pola semacam itu. Kalau kopinya Bengkulu dan Jatim menyatu, maka masyarakatnya juga semakin menyatu. Termasuk sektor pertanian juga bisa dilakukan karena produksi padi Bengkulu gabah nya surplus,” tutupnya. [tam.iib]

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	Pembelian Gula di Tingkat Petani Kini Rp12.500 Per Kilogram	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juli 2023	
Media	Tribun Jogja	
Page	3	
Author	Ktn	

Pembelian Gula di Tingkat Petani Kini Rp12.500 Per Kilogram

JAKARTA, TRIBUN - Sebagai upaya memperkuat stabilisasi pasokan dan harga gula konsumsi nasional, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menerbitkan Surat Edaran (SE) Badan Pangan Nasional Nomor 159/TS.02.02/K/6/2023 tentang Harga Pembelian Gula Kristal Putih (GKP) di Tingkat Petani.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, mengatakan, SE tersebut memuat pedoman tentang harga pembelian gula kristal putih (GKP) di tingkat petani. Dalam SE disebutkan agar pembelian GKP di tingkat petani oleh pelaku usaha gula dilakukan dengan harga paling sedikit Rp12.500 per kilogram.

"Harga pembelian tersebut berlaku mulai pada tanggal 3 Juli 2023. Sejak tanggal pemberlakuannya, SE tersebut berfungsi sebagai dasar harga pembelian GKP oleh pelaku usaha gula di tingkat petani," terangnya dalam keterangan tertulis, Minggu (2/7).

Menurut Arief, penerbitan SE ini untuk percepatan penerapan harga gula konsumsi yang wajar di tingkat petani sampai dengan diterbitkannya Perubahan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 tahun 2022. Har-

ga pembelian GKP di tingkat petani yang baru ini mengalami peningkatan dibanding ketentuan sebelumnya yang mengacu kepada Peraturan Nomor 11 Tahun 2022 atau sebelum rencana perubahan. "Harga pembelian di tingkat petani atau produsen naik sebesar Rp 1.000 per kilogram, dari Rp 11.500 per kilogram menjadi Rp 12.500 per kilogram," ujarnya.

Ia menjelaskan, penerbitan SE ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan harga gula dari hulu hingga hilir di tengah musim giling tebu yang sedang berlangsung. "Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan petani tebu, khususnya di tengah musim giling yang sedang berlangsung," kata Arief.

Arief mengungkapkan, kenaikan harga pembelian gula konsumsi di tingkat petani tidak terlepas dari adanya kenaikan biaya produksi seperti biaya sewa, tenaga kerja, benih, pupuk, dan pestisida, serta biaya distribusi. Adapun berdasarkan survei Biaya Pokok Produksi (BPP) Tebu 2023 oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, telah terjadi kenaikan BPP dari Rp589.229 per ton tebu menjadi Rp650.000 per ton tebu atau naik 9,08%. **(ktn)**

Title	Asuransi Khusus Ternak Banyak Diminati	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juli 2023	
Media	Harian Jogja	
Page	12	
Author	JIBI/Bisnis.com/Pernita Hestin Untari	

► PENJAMINAN ASET

Asuransi Khusus Ternak Banyak Diminati

JAKARTA—Peminat asuransi khusus untuk hewan ternak diklaim tinggi. Asuransi itu banyak dimanfaatkan masyarakat untuk melindungi berbagai risiko terhadap hewan ternak.

Direktur Pengembangan Bisnis Asuransi PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), Diwe Novara mengakui animo masyarakat untuk memiliki asuransi khusus untuk hewan ternak, yaitu Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTSK) yang disubsidi pemerintah, cukup tinggi.

Dia menjelaskan bahwa pemanfaatan asuransi hewan ternak tercermin dari pengajuan klaimnya kepada perseroan.

Berdasarkan data pelaksanaan AUTSK Program Subsidi Pemerintah sejak 2016-2022, asuransi itu memiliki rasio klaim yang sangat tinggi. "Menurut data per 29 Juni 2023, klaim AUTSK program subsidi pemerintah yang telah diselesaikan oleh Jasindo selama pelaksanaan program sejak 2016-2022 adalah sebesar Rp180,26

miliar," ujar Diwe, akhir pekan lalu.

Diwe mengatakan bahwa nilai klaim ini berpotensi meningkat mengingat masih adanya liabilitas atas polis 2022 yang akan berakhir pada akhir 2023.

Melihat tingginya *loss ratio* setiap tahunnya dan sebagai mitigasi risiko saat ini, Jasindo sedang mengajukan proses evaluasi perbaikan produk AUTSK ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu yang menjadi perhatiannya, kata Diwe, adalah cakupan proteksi asuransi hewan ternak, yakni hanya melindungi sapi atau kerbau betina.

Menurut dia, sapi atau kerbau jantan, termasuk untuk kurban, belum masuk dalam program pemerintah tersebut. Dengan pertimbangan sapi atau kerbau betina yang jumlahnya terbatas, dan untuk terus menjaga keberlangsungan usaha peternakan, Diwe menilai perlu adanya peninjauan ulang asuransi tersebut.

(JIBI/Bisnis.com/Pernita Hestin Untari)

KRITERIA LENGKAP ASURANSI HEWAN TERNAK:

1. Sapi/kerbau betina berumur minimal satu tahun.
2. Sapi/kerbau memiliki identitas yang jelas seperti eartag/necktag/micro-chip/Kartu Ternak.
3. Peternak tergabung dalam kelompok ternak/gabungan kelompok ternak.
4. Peternak yang melakukan usaha pembibitan maupun pembiakan.

KLAIM YANG DIJAMIN DALAM POLIS AUTSK (PROGRAM PEMERINTAH):

1. Sapi/kerbau mati karena penyakit. Penyakit yang dijamin dalam polis adalah Anthrax, Brucellosis, Hemorrhagic septicaemia, Infectious Bovine Rhinotracheitis, Bovine tuberculosis, Paratuberculosis, Campylobacteriosis, dan penyakit jembrana.
2. Sapi/kerbau mati karena beranak.
3. Sapi/kerbau mati karena kecelakaan.
4. Kehilangan sapi/kerbau karena kemalingan.

Sumber: Juknis AUTSK yang dikeluarkan oleh Kementan (JIBI)

Title	Kasus Gigitan Hewan Penularan Rabies di Jakarta Meningkat, Tolong Perhatikan Imbauan Dinkes	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juli 2023	
Media	Fajar Cirebon	
Page	7	
Author	Jpn/FC	

Kasus Gigitan Hewan Penularan Rabies di Jakarta Meningkat, Tolong Perhatikan Imbauan Dinkes!

JAKARTA, (FC).- Kasus gigitan hewan penularan rabies (GHPR) di DKI Jakarta mengalami peningkatan. Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta menyampaikan terdapat kenaikan kasus GHPR sebanyak 206 laporan pada Juni 2023 dari sejumlah rumah sakit dan puskesmas di DKI Jakarta.

Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinkes DKI Jakarta Ngabila Salama menyampaikan pada Juni terdapat akumulasi 1.733 kasus GHPR di DKI Jakarta, yang naik 206 kasus dari total 1.527 kasus pada Mei 2023.

"Ada 1.733 kasus GHPR pada Juni 2023 di DKI Jakarta yang merupakan laporan dari total lima RS, yaitu dua rumah sakit rujukan di DKI Jakarta, dua RSUD, dan satu rumah sakit swasta di Jakarta," kata Ngabila Salama, Minggu (2/7).

Ngabila mengatakan kasus gigitan tersebut berasal dari kucing, anjing, monyet, kera dan kelelawar.

Dia menyebutkan berdasarkan data dari 194 rumah sakit (RS) dan 44 Puskesmas Kecamatan di DKI Jakarta pada 2023, tidak ada sama sekali kasus rabies positif dan kematian akibat gigitan hewan tersebut, tetapi hanya jumlah orang yang tergigit hewan.

Sejak 2004, status DKI Jakarta merupakan daerah bebas rabies yang

ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 566/Kpts/PD.640/10/2004 tentang Pernyataan Provinsi DKI Jakarta Bebas Rabies.

"Kami mengimbau untuk pencegahan dapat dilakukan dengan lebih peka anak, lansia, kelompok disabilitas, pengasuh hewan, dan masyarakat lain untuk menghindari lokasi spesifik terdapat anjing untuk menghindari gigitan," pesan Ngabila.

Dinkes DKI juga mengimbau masyarakat untuk bekerja sama dengan RT setempat dalam melakukan pencegahan gigitan anjing dan kucing terutama di area pemukiman.

Pemilik hewan peliharaan kucing dan anjing secara berkala juga sebaiknya melakukan vaksinasi rabies pada hewan, dapat berkoordinasi dengan penanggung jawab kesehatan hewan di setiap kantor kecamatan apabila ada program vaksinasi hewan gratis dari pemerintah atau berbayar di klinik hewan terdekat.

Adapun sebaran kasus GHPR DKI Jakarta selama Januari-Juni 2023, mayoritas korban berasal dari luar wilayah, yaitu sebanyak 418 kasus. Kasus GHPR di wilayah Jakarta Selatan sebanyak 154, Jakarta Pusat (156), Jakarta Barat (260), Jakarta Timur (369) dan Jakarta Utara



sebanyak 376. Lalu, laporan kasus GHPR di dua rumah sakit rujukan di DKI Jakarta, yakni RSUD Tarakan sebanyak 802 kasus.

Sedangkan di RSPI Sulianti Saroso sebanyak 926 kasus. Sebelumnya, Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta mengatakan terus memperkuat kebijakan dan strategi peningkatan cakupan vaksinasi rabies secara

berkelanjutan pada anjing, kucing dan hewan penular rabies (HPR) lainnya untuk mempertahankan Jakarta bebas rabies.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan vaksinasi terhadap 43.000 ekor HPR. Saat ini, realisasi kurang lebih sudah 37,7 persen. Sampai saat ini untuk vaksin rabies anjing sudah 3.146 ekor, sedangkan kucing sudah 13.280 ekor: (jpn/FC)

Title	Masukkan Data Petani ke e-RDKK	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juli 2023	
Media	Suara Ntb	
Page	1 Part 1	
Author	Ris	



H. Haerul Warisin

Masukkan Data Petani ke e-RDKK

MUNCULNYA laporan pupuk subsidi yang terbatas dan sering tidak cukup di kalangan petani kerap muncul saat musim tanam tiba.

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi NTB H. Haerul Warisin mengatakan, untuk mengurangi kelangkaan pupuk subsidi saat musim tanam, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) harus memasukkan data petani yang telah memenuhi kriteria ke dalam elektronik Rencana Definatif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) atau e-Aplikasi.

"PPL yang mengusahakan agar petani betul betul dimasukkan dalam dalam e-RDKK. Tak ada cara lain, hanya petani itu harus dimasukkan dalam e-RDKK. Kalau tak masuk di sana, tak bisa diupayakan. Sudah jatah per hektare sedikit kemudian PPL tak memasukkan data ke RDKK, ya kesalahan petugas," kata Haerul Warisin kepada *Ekbis NTB* akhir pekan kemarin.

Ia mengatakan, petani memang banyak yang melaporkan bahwa mereka mendapatkan jatah pupuk subsidi yang terbatas atau sedikit. Berbeda halnya dengan beberapa tahun sebelumnya yang jumlah pupuk subsidi dirasa sudah mencukupi.

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, petani yang tak masuk dalam e-RDKK juga karena pemilik lahan itu sendiri yang tak aktif menyerahkan data-datanya ke PPL. Misalnya tempat tinggal pemilik lahan jauh dari sawahnya, sementara para penggarap juga tak menyerahkan data yang dibutuhkan sebagai syarat memperoleh pupuk subsidi.

"Ada memang petani yang tak masuk dalam e-RDKK, tapi mereka adalah penyakap. Karena petani yang memiliki lahan tidak menyerahkan KTP dan data-datanya kepada PPL. Lahan orang yang bersangkutan ada di Lombok Timur misalnya, terus pemiliknya di Mataram. Ini jadi masalah," katanya.

Untuk mensiasati kekurangan pupuk subsidi, petani terdang membuat pupuk organik agar hasil pertaniannya semakin bagus. Ada pula yang terpaksa membeli pupuk non subsidi dengan harga yang lebih mahal tentunya untuk memenuhi kekurangan.

Bersambung ke hal 2

Title	Masukkan Data Petani ke e-RDKK	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juli 2023	
Media	Suara Ntb	
Page	1 Part 2	
Author	Ris	

Masukkan Data Petani ke e-RDKK

Dari Hal. 1

Untuk diketahui, aturan mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan pupuk tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022. Dalam dokumen itu dinyatakan, untuk mendapatkan pupuk bersubsidi petani harus tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan).

Ketentuan lainnya, penerima pupuk subsidi hanya menggarap lahan dengan luas maksimal dua hektare per musim tanam. Permentan 10/2022 juga mengatur komoditas yang bisa mendapatkan

subsidi hanya sembilan jenis, antara lain padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, kakao, tebu, dan kopi.

Artinya, hanya petani yang menanam sembilan komoditas itu, memiliki Kartu Tani, dan terdaftar dalam sistem yang dapat memperoleh pupuk bersubsidi. Perampangan jumlah komoditas penerima pupuk itu berkaitan dengan efisiensi di tengah kenaikan harga bahan baku pupuk akibat perang Rusia-Ukraina. Jenis pupuk subsidi pun kini hanya dua, yakni NPK dan urea, dari sebelumnya ada lima jenis pupuk subsidi.**(ris)**

Title	Menguji Demokrasi di Pilpres 2024	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juli 2023	
Media	Jambi Independent	
Page	4	
Author	Arjuna Aurelyan Adham	

Menguji Demokrasi di Pilpres 2024

PEMILIHAN Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 semakin dekat. Hingga saat ini paling tidak terdapat 3 koalisi besar parpol yang diyakini akan mengusung Calon Presiden (Capres) masing-masing. **Pertama**, Koalisi Perubahan, yang dipimpin oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat (PD). Koalisi ini sejak awal telah menggaungkan Anies Baswedan sebagai capres. **Kedua**, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), yang dipimpin oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan beranggotakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini. Koalisi ini menetapkan Prabowo Subianto sebagai capres. **Ketiga**, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yang dipimpin oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan terdiri dari Partai Golkar (PG), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Koalisi ini menetapkan Ganjar Pranowo sebagai capres.

Pembahasan tentang demokrasi dalam konteks kontestasi di arena Pilpres 2024 dirasa akan lebih tepat jika merujuk kepada pendapat 2 ilmuwan politik yaitu Robert A. Dahl dan Maswadi Rauf. Ilmuwan politik ini menyinggung tentang keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan

politik. Tulisan ini ingin menyoroti apakah demokrasi telah ambil bagian dalam Pilpres 2024, khususnya dalam pengusungan capres oleh parpol yang tergabung dalam 3 koalisi di atas.

Dinamika politik yang terjadi saat ini, menunjukkan bahwa dari 3 koalisi pengusung Capres 2024, terdapat 1 koalisi pengusung capres yang tengah menghadapi tekanan politik luar biasa dari rezim yang berkuasa, yaitu Koalisi Perubahan dengan Anies Baswedan sebagai capres. Tekanan politik terhadap Koalisi Perubahan dapat dimaknai sebagai upaya untuk memperlemah konsolidasi kekuatan yang pada level paling kritis mengarah kepada upaya penggalan pencapresan Anies Baswedan. Berdasarkan analisis penulis, terdapat 2 (dua) indikator yang menerangkan upaya sistematis rezim yang tengah berkuasa dalam menekan Koalisi Perubahan:

Pertama, melakukan pembatasan terhadap upaya Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko untuk mengambil alih kepemimpinan PD dari tangan Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat saat ini, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Upaya pengambilalihan pimpinan PD oleh Moeldoko, diawali dengan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) PD pada

tanggal 5 Maret 2021 di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dan saat ini Kubu Moeldoko tengah mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) kepengurusan PD ke Mahkamah Agung (MA).

Apabila Moeldoko berhasil mengambil alih PD, maka sudah dapat dipastikan bahwa PD akan keluar dari Koalisi Perubahan dan akan mengurangi persentase dukungan terhadap Anies Baswedan. Saat ini Koalisi Perubahan didukung oleh 163 kursi parlemen (28,3%) dan sudah memenuhi ambang batas *Presidential Threshold* (PT). Namun demikian, jika MA mengabulkan PK yang diajukan oleh Moeldoko, maka Koalisi Perubahan tidak akan



O l e h

ARJUNA AURELYAN ADHAM

dapat memenuhi ambang batas PT sehingga tidak dapat mengusung Anies Baswedan pada kontestasi Pilpres 2024.

Kedua, menjadikan menteri-menteri yang berasal

dari Partai Nasdem sebagai orang yang tersangkut kasus hukum. Pasca pendeklarasian Anies Baswedan, satu persatu menteri dari Partai Nasdem ditetapkan terlibat dalam kasus hukum, mulai dari Johnny G. Plate (Sekretaris Jenderal Partai Nasdem sekaligus Menteri Komunikasi dan Informatika) hingga Syahrul Yasin Limpo (Wakil Ketua Dewan Pakar Pusat Partai Nasdem sekaligus Menteri Pertanian).

Berbagai upaya sistematis rezim yang tengah berkuasa dalam menggerogoti kekuatan dan soliditas Koalisi Perubahan sebagaimana diuraikan di muka, dari sisi politis, jelas bertentangan dengan semangat demokrasi, sebagaimana dimaksud

oleh Robert A. Dahl dan Maswadi Rauf.

Upaya menjegal Koalisi Perubahan dan capres yang diusungnya merupakan ujian nyata bagi kelangsungan demokrasi di negeri ini. Pilpres 2024 yang diidealkan sebagai bentuk kompetisi guna mencari pemimpin terbaik bangsa untuk masa 5 tahun ke depan, sedari awal ternyata nilai-nilai demokrasinya telah coba diceroder sendiri oleh rezim atau elit yang tengah berkuasa.

Demokrasi yang konsep awalnya menempatkan rakyat pada posisi yang berdaulat, kini justru dibajak oleh rezim yang sedang berkuasa demi kepentingan kelanggengan kekuasaan. Penulis tidak dalam posisi

membela Koalisi Perubahan dan Anies Baswedan sebagai capres yang diusungnya, akan tetapi mencoba memberikan perspektif politik yang lebih demokratis, yaitu kita berikan ruang dan kesempatan yang sama bagi semua pihak/kelompok, termasuk kepada Koalisi Perubahan dan Anies Baswedan untuk turut serta berkompetisi di arena Pilpres 2024.

Bukankah demokrasi itu menempatkan semua orang dalam posisi yang setara, termasuk setara dalam sebuah kompetisi? ()*

Penulis adalah Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Malang

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTAN

Title	Petani Diajak Manfaatkan Limbah Pertanian	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juli 2023	
Media	Magelang Ekspres	
Page	4 Part 1	
Author	Osi	

Petani Diajak Manfaatkan Limbah Pertanian

MANFAATKAN. Mahasiswa Polbangtan mensosialisasikan pemanfaatan limbah pertanian kepada para petani.



MAGELANG - Audio visual mengambil peran penting dalam penyuluhan pertanian, hal ini dapat memudahkan petani dalam memahami informasi, sekaligus meningkatkan jumlah audiens untuk mengaksesnya.

Tergugah, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang (Polbangtan YOMA) melakukan kegiatan penyuluhan dengan menggunakan video explainer. Explainer video berisi video animasi sederhana berdurasi singkat, dengan bahasa yang mudah dipahami dan dirancang agar audiens mudah memahami pesan yang ingin disampaikan.

Keterarikan generasi muda terhadap teknologi, mem-

berikan angin segar terhadap perkembangan sector pertanian. Mereka berperan penting dalam mempercepat transfer pengetahuan dan inovasi bidang pertanian.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengajak generasi muda untuk meningkatkan kreatifitas dan menguasai teknologi. Menurutnya, ketahanan pangan membutuhkan tangan - tangan kreatif anak muda.

"Frame academic intelektual tidak terbatas lagi sekarang karena dunia terbuka dengan pertumbuhan teknologi dan informatika yang semakin canggih. Sekarang orang bisa belajar hanya melalui gadgetnya" jelas Menteri Syahrul.

ke hal 3

Title	Petani Diajak Manfaatkan Limbah Pertanian	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juli 2023	
Media	Magelang Ekspres	
Page	4 Part 2	
Author	Osi	

Petani Diajak Manfaatkan...

Sambungan

la mendorong anak muda untuk tidak kalah dari negara lain, karena menurutnya tidak adalagi sekat dimana sains, riset dan teknologi dapat diakses secara terbuka.

Disampaikan pula oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi, bahwa la dan jajarannya terus mendorong tumbuh dan berkembangnya generasi milenial di sector pertanian.

"Kementerian Pertanian, melalui BPPSDMP, focus pada upaya mencetak generasi milenial yang andal, kreatif, profesional, inovatif, dan unggul tentunya dalam penguasaan teknologi pertanian", sebut Dedi.

Hal ini mendorong Azhira Azzahra, mahasiswa program studi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan Polbangtan YOMA

untuk membuat explainer video mengenai pemanfaatan limbah pertanian.

Melalui video yang la buat, Azza mengajak petani di Desa Kapuhan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang untuk memanfaatkan kotoran sapi, limbah kubis, dan limbah baglog jamur menjadi pupuk organik. Dengan pengolahan limbah menjadi vermikompos, menurutnya, mampu meningkatkan pendapatan petani.

"Sebelumnya petani tidak mengolah kotoran sapi. Mereka langsung menggunakannya sebagai dasaran sebelum menanam sayur. Sedangkan limbah sayuran terbungkalai begitu saja, menyebabkan pencemaran," jelas mahasiswa tingkat akhir ini.

Namun setelah mengolah limbah pertanian ini, la mengatakan petani bisa menjual pupuk olahan ke

kelompok tani lainnya, sehingga meningkatkan pendapatan kelompok tani.

Video yang la buat telah melalui serangkaian uji kelayakan, sehingga mudah dimengerti oleh petani di Desa Kapuhan, yang 45 % petaninya berlatar pendidikan sekolah dasar.

Di samping itu, dengan menggunakan explainer video memungkinkan desiminasi informasi antar petani. Dengan kemudahan akses ini, la berharap akan semakin banyak petani yang bisa mengadopsi pengolahan limbah dengan cara vermikompos.

Tak hanya itu, media penyuluhan dengan menggunakan explainer video ini dinilai efektif. Sehingga penyuluh pertanian di lapangan dapat menggunakan media serupa untuk meningkatkan kapasitas petani dalam menyerap informasi baru. (osi)

Title	Pupuk Subsidi Hanya untuk Petani yang Memenuhi Syarat	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juli 2023	
Media	Suara Ntb	
Page	1 Part 1	
Author	Bul	

Pupuk Subsidi Hanya untuk Petani yang Memenuhi Syarat

DALAM rangka memenuhi kebutuhan pupuk petani di musim tanam kedua tahun 2023, PT Pupuk Indonesia (Persero) menyediakan stok pupuk bersubsidi sebesar 375.492 ton di gudang lini III untuk wilayah Indonesia Bagian Timur.

SVP PSO Timur Pupuk Indonesia, Agus Susanto mengungkapkan Pupuk Indonesia menyediakan pada awal bulan Juni 2023 menyediakan stok pupuk bersubsidi sebesar 45.044 ton, yang terdiri dari pupuk Urea sebesar 34.480 ton, pupuk NPK sebesar 11.333 ton, dan NPK kakao sebesar 231 ton.

Menurut Agus, stok yang disediakan ini telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 4 Tahun 2023, di mana aturan ini menetapkan produsen untuk menyediakan stok di gudang Lini III mampu memenuhi kebutuhan selama 2 minggu ke depan.

■ **Bersambung ke hal 2**



(Ekbis NTB/bul)

ANGKUT - Keberadaan pupuk, baik bersubsidi atau nonsubsidi di tingkat distributor tidak ada masalah. Tampak salah satu buruh sedang mengangkut pupuk di gudang untuk dibawa ke konsumen.

Title	Pupuk Subsidi Hanya untuk Petani yang Memenuhi Syarat	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juli 2023	
Media	Suara Ntb	
Page	1 Part 2	
Author	Bul	

Pupuk Subsidi Hanya untuk Petani yang Memenuhi Syarat

Dari Hal. 1

“Jika dilihat dari stok pupuk subsidi yang ada ini, maka stok pupuk bersubsidi di wilayah NTB ini bisa memenuhi kebutuhan selama 1 bulan ke depan, karena stok urea yang sebesar 34.480 ton setara 579 persen, NPK sebesar 11.333 ton setara 325 persen, dan NPK kakao 231 ton setara 663 persen,” kata Agus pekan kemarin.

Stok pupuk bersubsidi ini, dikatakan Agus, hanya bisa didapat oleh petani yang memenuhi kriteria dan syarat Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sektor Pertanian. Dari aturan ini, petani wajib tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam Simluhtan (Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian), menggarap lahan maksimal dua hektar, dan menggunakan Kartu Tani (untuk wilayah tertentu).

“Petani yang berhak mendapat alokasi pupuk subsidi ini hanya dapat dapat menebus pupuk bersubsidi pada kios-kios resmi yang telah ditentukan untuk melayani kelompok tani setempat. Selain itu, para petani yang dapat juga harus terdaftar di e-Alokasi yang sebelumnya dikenal dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelom-

pok (RDKK),” tambah Agus.

Masih berdasarkan Permentan Nomor 10 Tahun 2022, Agus mengungkapkan bahwa Pemerintah telah menetapkan 9 (sembilan) komoditas yang berhak mendapat alokasi pupuk bersubsidi, yaitu padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, kopi, tebu rakyat dan kakao. Dengan kata lain, petani yang menggarap di luar komoditas tersebut tidak lagi berhak mendapat alokasi pupuk bersubsidi.

Pada kesempatan ini, Agus menyampaikan bahwa terdapat alokasi pupuk NPK Kakao untuk Provinsi NTB tahun 2023. Adapun alokasi pupuk NPK khusus kakao dengan formula (NPK 14-12-16-4) sebesar 1.067 ton yang tersebar di enam kabupaten, yaitu Lombok Utara sebesar 658 ton, Lombok Timur sebesar 259 ton, Lombok Barat sebesar 79 ton, Lombok Tengah sebesar 34 ton, dan Dompu sebesar 24 ton.

Berdasarkan Surat Keputusan, Pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi untuk wilayah Indonesia Timur sebesar 3.744.390 ton pada tahun 2023. Khusus wilayah NTB, pupuk bersubsidi telah berhasil disalurkan sebesar 148.794 ton hingga tanggal 7 Juni 2023. Adapun rinciannya adalah pupuk Urea sebesar 83.195 ton, pupuk NPK sebesar 65.514 ton, dan NPK Kakao sebesar 85 ton.(bul)

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	Maggot Sebagai Alternatif Pakan Ternak	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juli 2023	
Media	Solopos	
Page	10	
Author	Galih Aprilia Wibowo	

Maggot Sebagai Alternatif Pakan Ternak

GALIH APRILIA WIBOWO

SOLO—Larva lalat atau maggot semakin dilirik untuk dibudidayakan sebagai substitusi pakan ternak, utamanya unggas. Budi daya larva jenis *black soldier fly* (BSF) alias maggot itu bahkan tak hanya diminati oleh warga satelit Kota Solo, melainkan oleh warga Solo juga.

Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Jawa Tengah, Parjuni, saat dihubungi *Espos* pada Minggu (2/7/2023), menjelaskan sebagai pakan ternak ayam maggot lebih tinggi protein. "Bisa dicampur pakan ayam sebagai sumber protein yang tinggi, mudah, dan murah," ujar Parjuni.

Ia menguraikan mencampur pakan ayam produk pabrik dengan maggot bisa menekan biaya harga pokok penjualan (HPP).

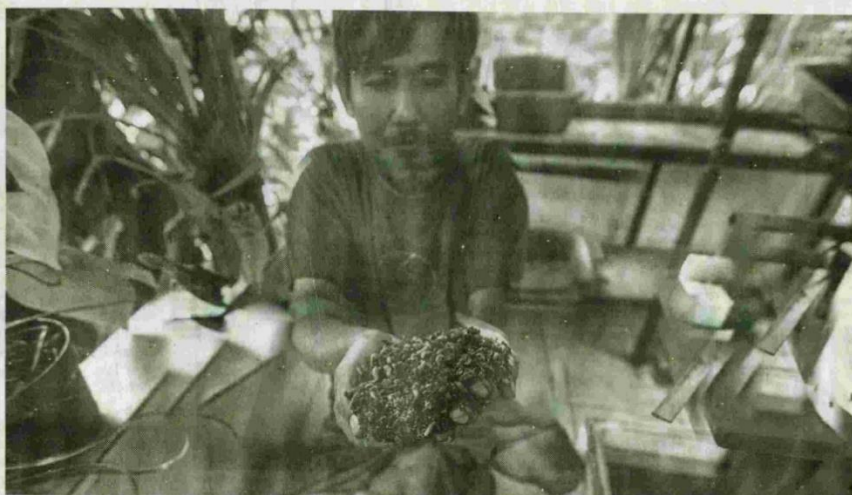
Pembudidaya maggot asal Kelurahan Gajah, Pasar Kliwon, Hari Wiradi, 49, menjelaskan maggot banyak dibutuhkan peternak ayam dan lele sebagai pakan pengganti atau untuk campuran pakan pabrik. Maggot untuk pakan bisa dijual dengan harga Rp7.000/kilogram (kg) hingga Rp10.000/kg.

Sementara itu untuk maggot kering

bisa dijual hingga Rp50.000/kg. Ia mengaku banyak mendapatkan pesanan dari peternak-peternak di Soloraya. Bahkan, kata Hari, ada peternak yang meminta dikirim maggot 50 kg/pekan. Namun, ia mengaku belum mampu membudidayakan maggot dalam skala besar karena keterbatasan lahan. Hari mengungkapkan untuk memulai budi daya maggot bisa dimulai dari telur maggot. Saat ini, telur maggot marak dijual di marketplace atau lokapasar dengan harga berkisar Rp2.500/gram atau Rp2,5 juta/kg. Tentu hal ini juga menjadi potensi besar karena pembudidaya maggot bisa fokus mengembangkan telur maggot ini lalu dijual.

"Karena memang peternak ayam atau ikan kalau mengandalkan pelet itu enggak menutup harganya. Biasanya kemudian dicampur maggot fresh [segar], atau bisa dikeringkan dulu," kata Hari saat ditemui *Espos* di rumahnya, Minggu. Pembudidaya maggot dari Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dispartan) Kota Solo, Wiyono, menguraikan maggot bisa menjadi pilihan pakan ternak. Dia menjelaskan untuk 5 gram telur maggot membutuhkan 5 kg-10 kg sampah organik per hari.

Ia menguraikan maggot basah laku dijual hingga Rp7.000/kg. Maggot kering lebih mahal yakni seharga Rp50.000/kg.



Pekerja menunjukkan maggot siap panen di rumah budi daya maggot di Kelurahan Gajah, Pasar Kliwon, Solo, Minggu (2/7/2023). Budi daya maggot di sana dimulai sejak tahun 2019 berawal dari bagaimana mengatasi permasalahan sampah di kampung. Kini maggot menjadi bahan baku pakan ternak yang dijual dengan harga Rp7.000/kilogram (kg) hingga Rp10.000/kg dan maggot kering dijual Rp50.000/kg.

Keuntungan budi daya maggot, kata Wiyono, yakni bisa tumbuh dengan cepat dan tanpa membutuhkan pemeliharaan khusus. Telur lalat BSF perlu waktu tiga hingga empat hari untuk menetas, kemudian bayi larva tumbuh selama sepekan menjadi larva dewasa.

Siklus hidup maggot hingga lalat membutuhkan 40 hari. Tidak memerlukan modal yang cukup mahal. Namun, perlu pasokan sampah organik yang berkelanjutan. Pentingnya pengembangan produktivitas maggot juga menjadi pembicaraan di Kementerian Pertanian. Berdasarkan penelusuran *Espos*, Minggu, Kementerian Pertanian memperhatikan budi daya maggot dan kacang koro pedang sebagai pilihan pengganti pakan impor.

Harga pakan semakin tinggi disebabkan oleh berkurangnya armada transportasi internasional, kemudian kenaikan biaya kontainer, kecenderungan masing-masing Negara mengamankan pangan dan pakan, serta masih tingginya komponen bahan pakan yang tergantung impor. Untuk itu, sumber daya pakan lokal dinilai penting dipikirkan untuk kelangsungan pakan dan peternakan.

Mengutip pembicaraan yang dilansir laman Kementerian Pertanian, maggot merupakan penghasil protein hewani yang tinggi dan memiliki kandungan protein sekitar 41%-42%. Maggot dapat mensubstitusi 100% tepung ikan pada ayam broiler periode starter dan grower dengan menghasilkan bobot ayam broiler yang tidak berbeda nyata namun lebih ekonomis.

Profesor Nahrrowi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) mengatakan pemakaian bahan pakan baik impor maupun lokal sebenarnya tidak masalah asalkan ketersediaan, harga,

dan kualitasnya bagus. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, terbukti bahwa kacang koro pedang dan maggot dari segi kandungan nutrisi memenuhi syarat sebagai bahan pakan andalan sumber protein di Indonesia. Sementara itu, juga mengemuka stabilitas

ketersediaan bahan pakan lokal berikut kualitasnya belum sesuai harapan selama ini. Hal tersebut dinilai pakan lokal menjadi kurang kompetitif dan tidak berkelanjutan. Menjamin ketersediaan maggot, berdasar pembicaraan itu, bisa dilakukan dengan menggerakkan

masyarakat untuk mengelola sampah dapurnya, kemudian membuat sistem inti plasma untuk pembesaran maggot di setiap daerah, atau membuat tiga kelompok bisnis yang bertokus pada pembibitan, pembesaran, dan pengolahan.

**MAGGOT
PENGANTI
PAKAN TERNAK**



SEPUTAR MAGGOT

- Maggot merupakan organisme dari larva *black soldier fly* (BSF)
- Maggot atau larva lalat banyak dikembangkan untuk pakan ternak
- Maggot merupakan organisme ber tipe penghisap
- Organisme tersebut banyak dikembangkan karena cukup efisien pakannya
- Banyak sampah makanan rumah tangga didistribusikan untuk pakan maggot
- Pembudi daya maggot kemudian mengolah sampah itu menjadi makanan lunak
- Di Soloraya, maggot dibudidayakan di Klaten hingga Kota Solo

SUBSTITUSI PAKAN

- Maggot banyak dilirik untuk substitusi pakan ternak
- Pakan ternak lazimnya mendapat porsi 47,58%-70,97% produksi peternakan
- Maggot disebut punya kandungan nutrisi tinggi, baik protein, asam amino, asam lemak, serta mineral
- Kandungan protein maggot hingga 36,51%
- Maggot berpotensi menjadi alternatif pakan untuk ternak unggas
- Selain itu, maggot bisa juga dimanfaatkan untuk menyusui pakan konsentrat pada ternak ruminansia
- Maggot bermanfaat mereduksi bau atau polusi

HASIL ANALISIS KANDUNGAN MAGGOT

ZAT-ZAT MAKANAN	KANDUNGAN	ZAT-ZAT MAKANAN	KANDUNGAN
Energi metabolisme	4720,59 Kkal/kg	Total padatan	34,76%
Protein	36,51%	Kadar air	7,78%
Abu	9,34%	Kalsium	1,52%
Lemak	28,12%	Fosfor	0,83%
Serat	8,36%		

Sumber: Data dari wawancara dan penelitian hasil (pilot) (Galih Aprilia Wibowo)

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Title	Factory Sharing Harus Ciptakan Konglomerasi Berbasis Usaha Kecil	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juli 2023	
Media	Neraca	
Page	10	
Author	Gro	

Factory Sharing Harus Ciptakan Konglomerasi Berbasis Usaha Kecil

NERACA

Sleman - Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menekankan keberadaan dan pengelolaan Rumah Produksi Bersama (RPB) atau Factory Sharing harus diarahkan untuk menciptakan konglomerasi berbasis usaha-usaha kecil.

"Selain itu, *Factory Sharing* yang dikelola koperasi harus dilakukan secara benar dengan standar industri. Pola pikir pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) harus sudah mengarah ke industrialisasi," ucap Teten, saat meninjau pembangunan *Factory Sharing* Pengolahan Susu, di Kecamatan Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Di depan para pelaku koperasi dan peternak (sapi dan kambing), Teten berharap *Factory Sharing* di Sleman ini sudah bisa beroperasi pada November 2023.

"Tujuan utama membangun *piloting Factory Sharing* adalah meningkatkan kualitas produk UMKM," kata Teten.

Dengan begitu, para peternak sapi perah dan kambing di Yogyakarta tidak lagi menjual bahan mentah-

nya. "Dikelola di pabrik ini menjadi produk susu UHT. Nilai tambah produk meningkat, sehingga kesejahteraan peternak juga ikut naik," tambah Teten.

MenkopUKM memastikan, kualitas produk susu dari *Factory Sharing* sama dengan produk hasil pabrik. "Maka, peralatan produksi dalam *Factory Sharing* harus modern, tidak boleh asal-asalan," kata Menteri Teten.

Selain itu, Teten juga menegaskan bahwa *Factory Sharing* harus dikelola secara bisnis. Oleh karena itu, MenkopUKM meminta agar hal itu dipersiapkan dengan matang termasuk koperasi yang akan mengelola *Factory Sharing*. "Nantinya, diharapkan akan menghasilkan brand susu bersama, tidak lagi sendiri-sendiri seperti selama ini," kata Teten.

Bagi Teten, dengan bergabung dalam satu brand saja, maka akan menciptakan nilai bisnis yang besar dengan market share yang besar pula. "Pelaku UMKM jangan lagi sendiri-sendiri, harus dikonsolidasi dan diagregasi lewat koperasi untuk meningkatkan skala usaha," jelas Teten.

Lebih dari itu, kata

Teten, bila pelaku usaha yang kecil-kecil ini membangun ekonomi kolektif lewat koperasi, maka bisa terbangun efisiensi hingga mampu bersaing secara kompetitif. "Ini akan menjadi role model untuk pengembangan UMKM ke depan," tutur Teten.

Di NTT, misalnya, akan dibangun *Factory Sharing* untuk pengolahan produk bambu dan sapi. Sementara di Minahasa Selatan yang kaya akan perkebunan kelapa, akan dibangun pabrik pengolahan kelapa. "Tahun ini, kita akan membangun 8 *Factory Sharing*, sedangkan tahun lalu sudah ada 3. Hal seperti ini bisa dilakukan UMKM, bukan hanya konglomerat, tapi dengan standar pabrik," ucap MenkopUKM.

Nantinya, menurut Teten, dari mulai proses produksi, branding produk, izin edar, dan sebagainya, bakal terintegrasi dalam satu *Factory Sharing*. "Bila unsur higienis standar BPOM terpenuhi, maka produk sudah mendapat izin edar," imbuh Teten.

Pembangunan *Factory Sharing* pengolahan susu di Yogyakarta mendapatkan dukungan penuh dari Pemprov DIY. 

Title	Juli 2023, Harga Referensi Biji Kakao Menguat	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juli 2023	
Media	Neraca	
Page	1	
Author	Gro	

Juli 2023, Harga Referensi Biji Kakao Menguat

NERACA

Jakarta - Harga referensi biji kakao periode Juli 2023 ditetapkan sebesar USD 3.114,88/MT, atau naik USD 145,79 atau 4,91 persen dari bulan sebelumnya. Hal ini berdampak pada peningkatan Harga Patokan Ekspor (HPE) biji kakao pada Juli 2023 menjadi USD 2.812/MT, naik USD 142 atau 5,31 persen dari periode sebelumnya.

Peningkatan harga ini tidak berdampak pada BK biji kakao, yaitu tetap 10 persen sesuai Kolom 3 Lampiran Huruf B pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK/0.10/2022 jo. Nomor 123/PMK.010/2022.

Penetapan HPE biji kakao, tertantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1124 Tahun 2023 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar (BK).

"Peningkatan harga referensi dan HPE biji kakao dipengaruhi

adanya peningkatan permintaan biji kakao terutama dari Amerika Utara namun produksi biji kakao di wilayah Afrika menurun akibat adanya badai El Nino," jelas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso.

Sebelumnya, pada bulan Juni 2023 harga referensi biji kakao ditetapkan sebesar USD 2.969,09/MT, meningkat sebesar USD 31,91 atau 1,09 persen dari bulan sebelumnya.

Lebih lanjut terkait dengan kakao, Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan Heru Tri Widarto mengakui bahwa Indonesia memiliki peluang besar dalam peningkatan nilai tambah komoditas kakao melalui hilirisasi. Bahkan dengan mendorong hilirisasi maka akan memberikan nilai jual yang lebih tinggi.

Sehingga dalam hal ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan turut aktif mendorong dan men-

ingkatkan produktivitas biji kakao hingga konsumsi produk kakao olahan. Karena permintaan kakao dunia akan terus meningkat, karena kakao memiliki prospek ke depan yang sangat baik.

Bahkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pun terus mendukung upaya peningkatan produktivitas dan daya saing sektor industri pengolahan kakao. Apalagi Indonesia memiliki potensi besar yang saat ini didukung oleh 11 industri pengolahan kakao intermediate dengan kapasitas sebesar 739.250 ton per tahun, 900 industri pengolahan cokelat dengan kapasitas 462.126 ton per tahun, dan 31 artisan cokelat/bean to bar dengan kapasitas 1.242 ton per tahun.

Pada tahun 2021, nilai ekspor produk kakao intermediate seperti cocoa liquor, cocoa butter, cocoa cake, dan cocoa powder menembus angka USD 1,08 miliar. Sumbangnya terhadap devisa tersebut cukup signifikan, yang berdampak

positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Secara volume, produk cokelat yang diekspor sebesar 319.431 ton atau 85 persen dari total produksi nasional dengan 96 negara tujuan, di antaranya Amerika Serikat, India, China, Estonia dan Malaysia. Dari sisi industri pengolahan cokelat, Indonesia berada di nomor tiga dunia, setelah Belanda dan Pantai Gading," kata Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika.

Lebih lanjut, Putu mengemukakan, pihaknya proaktif untuk mendorong kemitraan antara industri pengolahan kakao dengan para petani dalam rangka menjaga keberlangsungan produksi kakao di Indonesia serta meningkatkan mutu dan produktivitas bahan baku.

Selain itu, Kemenperin memacu peningkatan hilirisasi dan nilai tambah produk melalui diversifikasi produk dan pengembangan fine flavour cocoa berdasarkan

indikasi geografis. Salah satunya adalah pengembangan cokelat artisan atau bean to bar.

"Saat ini pangsa pasar cokelat artisan baru mengisi sebesar 2 persen dari konsumsi cokelat dalam negeri yang didominasi oleh cokelat industrial dan confectionary. Cokelat artisan berpeluang dapat mengisi pangsa sampai dengan 10 persen di Indonesia," papar Putu.

Bahan baku cokelat artisan merupakan biji kakao premium yang terfermentasi dengan baik dengan harga sebesar Rp50.000 per kilogram (kg) atau 43 persen lebih tinggi nilainya dari biji kakao yang dibeli oleh industri. Tentunya hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani kakao dan keberlangsungan kakao di Indonesia. "Kemenperin akan mendorong pengembangan cokelat artisan. Cokelat artisan Indonesia tidak kalah kualitasnya dengan produsen cokelat global," tambah Putu. 

Title	Pasca Idul Adha 1444 H, Sejumlah Bapokting di Sukabumi Alami Kenaikan Harga	
Date	3 Juli 2023	
Media	Neraca	
Page	9	
Author	Arya	

Pasca Idul Adha 1444 H, Sejumlah Bapokting di Sukabumi Alami Kenaikan Harga

NERACA

Sukabumi - Pasca Idul Adha 1444 Hijriyah, sejumlah Bahan Pokok dan Penting (Bapokting) di Kota Sukabumi alami kenaikan. Diantaranya, cabai rawit hijau dari Rp25 ribu menjadi Rp48 ribu per kg, cabai rawit merah semula Rp45 ribu menjadi Rp50 ribu per kg, bawang Bombay menjadi Rp40 ribu per kg dari sebelumnya Rp36 ribu per kg. Begitu juga dengan harga daging ayam broiler yang saat ini dikisaran Rp48 ribu dari Rp45 ribu per kg.

"Iya, hasil pemantauan kami dilapangan hari ini Sabtu, 1 Juli 2023, sejumlah Bapokting alami kenaikan harga," ujar Kepala seksi Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) Kota Sukabumi, M. Rifki, kepada Neraca, Sabtu (1/7).

Tapi, lanjut Rifki, ada sebagian juga komoditas yang harganya turun. Seperti, cabai merah besar TW dari Rp80 ribu menjadi Rp60 ribu per kg, cabai merah besar lokal semula Rp100 ribu kini dijual 90 ribu per kg, dan bawang merah Jawa menjadi Rp40 ribu dari Rp42 ribu per kg.

"Biasanya kenaikan pada komoditas disebabkan permintaan tinggi sedangkan pasokan tetap. Sedangkan untuk Bapokting yang turun dikarenakan pasokannya melimpah, tapi permintaan menurun, sehingga terkoreksi terhadap harga," jelasnya.

Sementara, untuk bahan pokok lainya sambung Rifki, hingga saat ini masih terpantau normal. Diantaranya, minyak goreng, garam, terigu, telur ayam negeri, bawang putih dan merah, serta gula pasir.

"Pengawasan terhadap Bapokting akan terus dilakukan. Hingga saat ini, ketersediaan masih tergolong aman dan lancar, serta fluktuatif harga masih dalam batas kewajaran," pungkasnya. ● **arya**

Title	Produksi Palawija di Lebak Januari-Mei 2023 Tembus 13.973 Ton	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juli 2023	
Media	Neraca	
Page	9	
Author	Ant	

Produksi Palawija di Lebak Januari-Mei 2023 Tembus 13.973 Ton

NERACA

Lebak - Produksi tanaman palawija di Kabupaten Lebak, Banten sejak kurun waktu Januari-Mei 2023 menembus sebanyak 13.973 ton dari lahan panen seluas 1.332 hektare.

"Diperkirakan hasil produksi palawija itu dipastikan bisa menyumbangkan ke-aulatan pangan lokal dan peningkatan ekonomi masyarakat setempat," kata Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Deni Iskandar, di Lebak, Jumat (30/6).

Produksi palawija di Kabupaten Lebak hingga kini masih menjadi andalan ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Pemerintah daerah

mendorong agar petani terus meningkatkan produktivitas, sehingga dapat memenuhi permintaan pasar.

Saat ini, kata dia, permintaan produksi palawija di pasaran cenderung meningkat dan mampu menyedjahterakan masyarakat setempat.

"Kami mengapresiasi komoditas singkong dan jagung bisa memenuhi permintaan pasar," kata Deni.

Menurut dia, produksi palawija di Kabupaten Lebak dari Januari-Mei 2023 sebanyak 13.973 ton terdiri dari komoditas jagung 2.739 ton, kedelai 102 ton, kacang tanah 125 ton, kacang ijo 5 ton, singkong 9.877 ton, dan ubi jalar 1.126 ton.

Diperkirakan perguliran uang dari produksi palawija

itu hingga ratusan juta rupiah dan sebagian besar dipasok ke Pasar Rangkasbitung, Tangerang, dan Jakarta.

Karena itu, pihaknya setiap tahun menyalurkan bantuan benih tanaman palawija kepada petani, agar bisa memenuhi permintaan pasar.

Namun, kendala yang dihadapi petani tersebut untuk menargetkan produksi palawija 550.000 ton/tahun akibat minimnya lahan kepemilikan. Sebab, ujar dia, lahan-lahan yang ada di masyarakat sudah milik perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN).

"Kita produksi tanaman palawija rata-rata 37.047 ton/tahun dan perlu dilakukan peningkatan produksi dengan memperluas

angka tanam juga bantuan benih," katanya menjelaskan.

Sementara itu, Edi Ju-naedi (55), seorang petani di Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak mengatakan pihaknya kini memanen singkong seluas dua hektare dengan produksi 40 ton dan dijual ke tengkulak Rp3.000/kilogram.

Jadi, jika diakumulasikan produksi 40 ton dengan harga Rp3.000/kilogram, maka bisa menghasilkan pendapatan Rp120 juta selama 10 bulan/musim panen.

"Kami beruntung menggarap tanaman singkong dengan memanfaatkan lahan milik pengembang yang belum digunakan untuk kawasan perumahan," katanya lagi.  ant

Title	Reformasi Bantuan dan Subsidi Input Kunci Peningkatan Produktivitas Pangan	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juli 2023	
Media	Neraca	
Page	9	
Author	Bari	

Reformasi Bantuan dan Subsidi Input Kunci Peningkatan Produktivitas Pangan

NERACA

Jakarta - Peningkatan produktivitas pangan, baik tanaman pangan maupun hortikultura, perlu didorong untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini juga perlu diupayakan untuk merespons berbagai tantangan di sektor pertanian.

Salah satu cara untuk mendorongnya adalah melalui reformasi kebijakan di sektor input pertanian.

“Perubahan iklim yang berdampak pada cuaca dan ketidakpastian musim tanam, salah satunya, mengakibatkan penurunan produksi.

Urgensi untuk peningkatan produktivitas, alih-alih membuka lahan baru, menjadi semakin besar,” jelas Head of Agriculture Research Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)

Aditya Alta, seperti dikutip dalam keterangannya, kemarin. Beberapa tantangan lain yang dihadapi petani adalah terbatasnya kesempatan kerja di pedesaan, menurunnya kepemilikan lahan pertanian oleh rumah tangga pertanian sehingga menyebabkan semakin banyak petani yang menjadi penggarap atau buruh tani, serta keterbatasan pengetahuan dan akses terhadap penggunaan input yang optimal.

Statistik menunjukkan produktivitas padi, kedelai, dan bawang merah cenderung landai dalam beberapa tahun terakhir dengan masing-masing di angka 5 ton per hektar gabah kering giling, 1,5 ton per hektar biji kering dan 10 ton per hektar. Sementara itu, produktivitas jagung menunjukkan tren yang meningkat den-

gan capaian 5,5 ton pipilan kering per hektar pada 2019 lalu.

Belajar dari kesuksesan peningkatan produktivitas tanaman jagung, salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendorong produktivitas tanaman padi adalah dengan meningkatkan skala penggunaan varietas unggul, khususnya padi jenis hibrida. Hingga saat ini tingkat penerimaan petani terhadap benih padi hibrida masih sangat rendah.

Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, hal lain yang dapat dilakukan adalah mendorong penggunaan kombinasi input pertanian, seperti pupuk, secara optimal dan tepat. Demi mendukung hal ini, akses input pertanian yang berkualitas dan terjangkau perlu lebih didorong. ● bari

Title	Stakeholder Harus Terlibat Dalam Kelembagaan Pekebun	 Kementerian Pertanian
Date	3 Juli 2023	
Media	Neraca	
Page	10	
Author	Iwan/gro	

Stakeholder Harus Terlibat Dalam Kelembagaan Pekebun

NERACA

Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) meminta jajarannya agar kontinyu dalam melakukan pembinaan dan mensosialisasikan pentingnya kelembagaan yang melibatkan stakeholder terkait.

Hal ini demi menyiapkan petani menghadapi berbagai tantangan tersebut.

Bahkan Kementan akan terus mendorong peran generasi muda dalam mengembangkan dan memajukan sektor perkebunan. Inilah saatnya petani milenial ikut terjun langsung geluti dan kembangkan komoditas perkebunan beserta produk turunannya.

"Untuk itu saya mengajak untuk mengoptimalkan inovasi dan menghasilkan produk baru yang jitu. Kita perkuat dan sinergikan bersama kekuatan komoditas kita," ujar Direktur Jenderal Perkebunan Andi Nur Alam Syah.

Di tengah maraknya berbagai daerah mengembangkan kopi sebagai produk unggulan, Asosiasi Kopi Minang pun hadir dengan program dan kegiatan yang difokuskan pada pengembangan brand kopi, khususnya di Sumatera Barat (Sumbar).

Saat ini, anggota asosiasi telah mencapai 160 orang, terdiri dari petani,

coffee shop hingga barista di Provinsi Sumbar. Pengurus baru komunitas sosial yang bergerak dan peduli akan kehadiran Kopi di Sumbar ini, dikukuhkan pada 14 Desember 2021 lalu dengan Ketua Umum AKM periode 2021 – 2024 adalah Putu Mulya Agung Wahyudi.

"Hadirnya Asosiasi ini, bertujuan agar nama kopi dari Sumbar terangkat di ranahnya sendiri. Kita ingin nama kopi Sumbar terangkat di ranah kita sendiri dulu, baru bicara nasional dan luar negeri," kata I Putu Mulya Agung Wahyudi, Ketua Asosiasi Kopi Minang saat ditemui disela-sela kegiatan Penas XVI Tahun 2023 di Padang, Sumbar, beberapa waktu lalu.

Menurut Putu, Sumbar ini daerah penghasil kopi, namun masih ditemui masyarakat ada yang menggunakan kopi dari luar.

Untuk itu kehadiran Asosiasi Kopi Minang untuk mengelola dan mengajak petani serta edukasi masyarakat bahwa ada kopi terbaik di Sumbar.

"Kita harapkan masyarakat mengetahui dan menyadari kita punya potensi kopi terbaik," ujarnya.

Putu menambahkan, konsistensi produk selama ini masih menjadi tantangan dalam memasarkan kopi asal Sumbar. Diketahui bahwa di Sumbar ada tujuh titik daerah penghasil kopi

yaitu Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, 50 Kota, Agam, dan Talamau Pasaman, yang tergabung dalam Coffee Minang Area. Masing-masing daerah memiliki kondisi tantangan geografis yang berbeda sehingga dibutuhkan konsistensi dalam proses panen hingga menghasilkan biji kopi mentah.

Karena itu Putu berharap, perlu ada menyeragamkan standar proses pengolahan agar kopi yang dihasilkan bermutu baik. Sebagai contoh sentra penghasil kopi di Solok dengan Kopi Solok Radjo, yang proses pengelolaannya mulai dari menanam hingga panen dan menghasilkan biji kopi mentah, sudah memenuhi standar yang baik.

Lebih lanjut, harus diakui produk kopi ternyata tidak hanya minuman. Dari biji kopi dapat dihasilkan produk olahan berupa parfum.

Di Eropa parfum dari biji kopi saat sudah populer. Permintaannya pun terus meningkat.

Kopi saat ini sudah diolah dengan berbagai variasi. "Kopi tidak hanya diminum, tetapi sekarang juga sudah ada parfum beraroma kopi, roti, dan sebagainya" ujar Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian (Kementan), Prayudi Syamsuri.

msuri.

Bahkan, lanjut Prayudi, produk olahan kopi berupa parfum sudah populer sampai ke Eropa. Karena itu Kementan terus berusaha menjaga kualitas dan kuantitas produksi kopi Indonesia agar pasokan cukup.

Prayudi berharap, kopi yang menjadi tanaman turunkemurun ini dapat selalu berkembang dengan baik.

"Produksi dan mutunya terus meningkat agar ekspornya terus naik sehingga devisa negara terus bertambah, khususnya bagi pendapatan petani kopi itu sendiri," ujar Prayudi.

Data Statistik Perkebunan, Ditjen Perkebunan, mencatat, dalam delapan tahun terakhir total ekspor kopi cenderung berfluktuasi.

Pada 2011 volume ekspor kopi mencapai 346,5 ribu ton senilai US\$ 1.036,7 juta turun menjadi 280 ribu ton pada 2018 dengan total nilai sebesar US\$ 815,9 juta.

Produksi kopi Indonesia sebagian besar diekspor ke mancanegara dan sisanya dipasarkan di dalam negeri. Ekspor kopi alam Indonesia menjangkau lima benua yaitu Asia, Afrika, Australia, Amerika dan Eropa dengan pangsa utama di Eropa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada periode Januari–April 2023, nilai ekspor produk kopi Indonesia ke dunia ter-

catat sebesar USD 236 juta. Sementara pada 2022, ekspor produk kopi Indonesia ke dunia tercatat sebesar USD 1,14 miliar, naik 34 persen dibanding tahun sebelumnya.

Selama periode 2018–2022, tren ekspor kopi ke dunia mengalami peningkatan sebesar 6,79 persen per tahun.

Pada periode Januari–April 2023, ekspor produk kopi Indonesia ke Yunani tercatat sebesar USD 824 ribu.

Sementara pada 2022, ekspor produk ini ke Yunani mencatatkan nilai sebesar USD 5,7 juta, naik 48,68 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada periode 2018–2022, tren ekspor produk kopi Indonesia ke Yunani rata-rata mengalami peningkatan sebesar 17,17 persen per tahun.

Lalu, pada 2018, lima besar negara pengimpor kopi alam Indonesia adalah United States, Malaysia, Japan, Egypt dan Italy. Volume ekspor ke United States mencapai 52,10 ribu ton atau 18,6 persen dari total volume ekspor kopi Indonesia dengan nilai 254,21 juta. Peringkat kedua adalah Malaysia, dengan volume ekspor sebesar 38,80 ribu ton atau 13,9 persen dari total volume kopi Indonesia dengan nilai 70,9 juta. @Iwan/gro